

DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023





H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
(2022-sekarang)

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (Tahun 1970 sampai sekarang)



R. HADI PURNOMO, S.H
(1970 - 1975)



SOEROTO, S.H
(1975 - 1982)



H. ROESLI, S.H
(1982 - 1988)



H. ZAKIR, S.H
(1988 - 1992)



SOELISTYOWATI SOEGONDO, S.H
(1992 - 1997)



H. PARMAN SOEPARMAN, S.H
(1997 - 2000)



SOEJATNO, S.H
(2000 - 2005)



M. HATTA ALI, S.H., M.H
(2005 - 2007)



CICUT SUTIAARSO, S.H., M.Hum
(2008 - 2013)



DR. HERRI SWANTORO, S.H., M.H
(2014-2019)



DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
(2019-2022)

PROFIL PIMPINAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



H. Bambang Myanto, S.H., M.H
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



K. Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum



Hasanudin, S.H., M.H
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan
Umum



Zahlisa Vitalita, S.H., M.H
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Umum

Mahkamah Agung RI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Dibantu Oleh:

**SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Dipimpin Oleh:

**DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA
TEKNIS PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR PEMBINAAN
ADMINISTRASI PERADILAN UMUM**

VISI DAN MISI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Visi

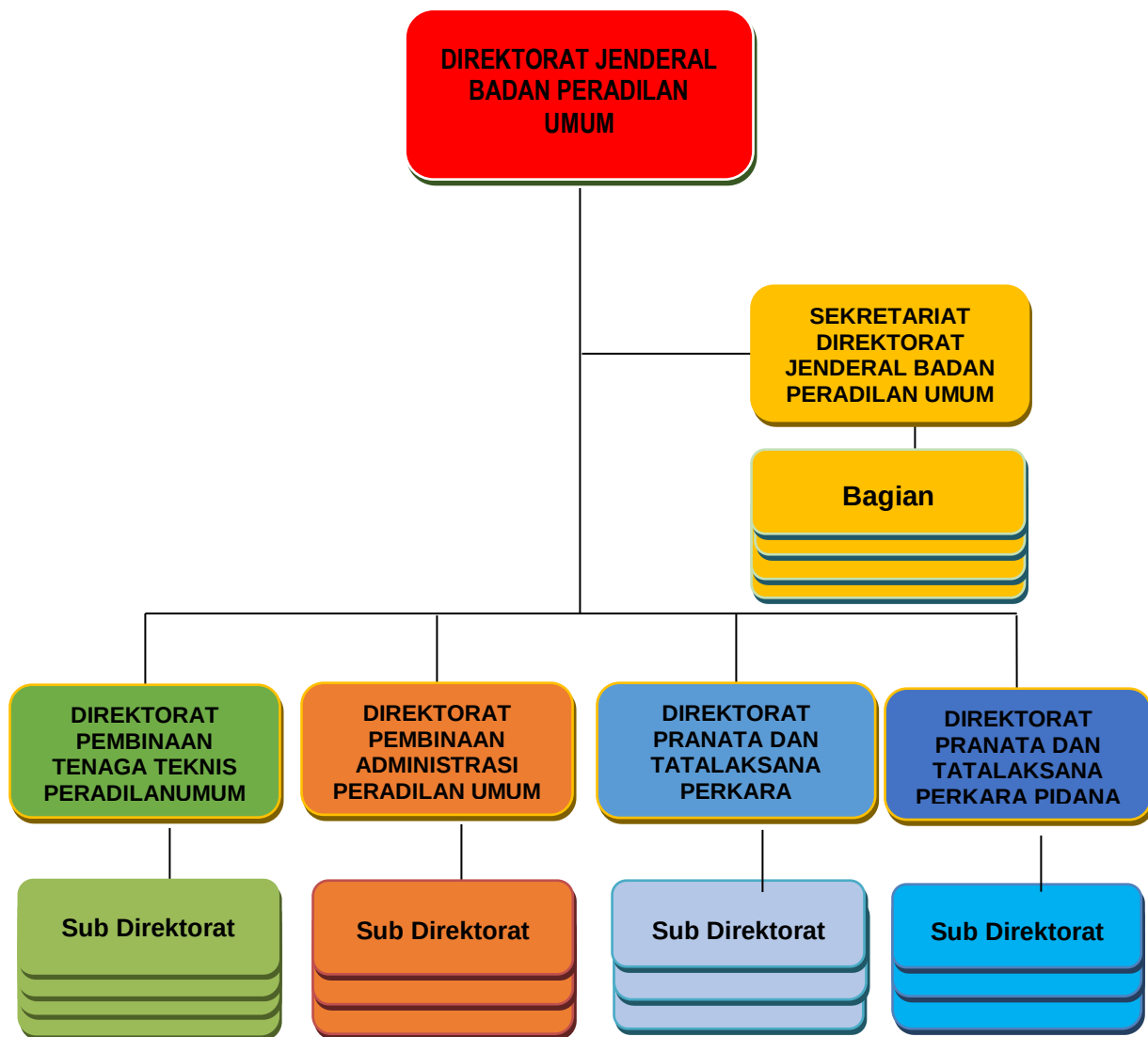
Terwujudnya
Badan
Peradilan
Umum yang
Agung

Misi

1. Menjaga Kemandirian
Badan Peradilan Umum;
2. Memberikan Dukungan
Pelayanan Hukum yang
Berkeadilan Bagi Pencari
Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas
Kepemimpinan Badan
Peradilan Umum;
4. Meningkatkan
Kredibilitas dan
Transparansi Badan
Peradilan Umum.

Bagan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Kata Pengantar



Segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dan Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Laporan Tahunan menyajikan berbagai informasi sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama tahun 2023 yang meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, keadaan perkara, pengawasan internal, serta pembinaan dan pengelolaan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2023.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus melakukan upaya perbaikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang baik teknis yudisial maupun di bidang kesekretariatan dengan peradilan modern menjadi basis utama dalam mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pada umumnya.

Seperti semboyan karya darma prajamukti yang berarti berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara seperti dalam cetak biru pembaruan peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu persidangan modern, pencari keadilan yang mempunyai permasalahan dengan hukum untuk datang ke Pengadilan dengan lokasi jauh dari tempat tinggal lebih diuntungkan untuk menjalani persidangan secara virtual yang terkoneksi secara langsung ke

Pengadilan dengan dibantu pemerintah setempat membuat ruang sidang secara virtual.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang secara terbuka dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023, namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga pasti ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga kerja keras kita dapat membawa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam mewujudkan peradilan yang modern sebagai harapan kita bersama.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 26 Februari 2024

**Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum**

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "MAHKAMAH AGUNG" at the top and "DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM" at the bottom. In the center of the stamp is the emblem of the Mahkamah Agung. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "H. Bambang Myianto".

H. BAMBANG MYIANTO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN.....	ii
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA	3
1. Jumlah Pengadilan.....	3
A. Jumlah Pengadilan Negeri.....	3
B. Klasifikasi Pengadilan Tinggi	4
C. Jumlah Pengadilan Khusus.....	4
2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan	4
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	4
B. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi.....	26
3. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan	27
A. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri	27
B. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi.....	31
4. Capaian Prioritas Nasional	34
A. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	34
B. Sidang Diluar Gedung Pengadilan	35

C. Pembebasan Biaya Perkara.....	38
5. Penghargaan Pengadilan	40
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	44
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial	44
a. Data Hakim Seluruh Indonesia.....	44
b. Promosi dan Mutasi Hakim	46
c. Hukuman Disiplin Hakim.....	47
d. Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim.....	47
e. Diklat Hakim	48
f. Data Kepaniteraan Seluruh Indonesia	50
g. Promosi dan Mutasi Panitera.....	51
h. Hukuman Disiplin Panitera	51
i. Pensiun dan Meninggal Panitera	51
2. Sumber Daya Manusia Non Yustisial	52
A. Data Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	52
B. Pelatihan, Diklat dan Asessment	54
C. Rekrutmen, Latsar dan Piagam	54
D. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar	54
E. Kenaikan Pangkat.....	54
3. Bimbingan Teknis Peradilan Umum	55
4. Penghargaan Prestasi Kinerja SDM Tenaga Teknis	61
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	64

1. Pengelolaan Keuangan	64
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	66
3. Pengelolaan Teknologi Informasi	78
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	80
1. Zona Integritas.....	80
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	82
3. Inovasi Pelayan Publik.....	84
BAB VI PENGAWASAN	91
1. INTERNAL.....	91
2. EVALUASI.....	92
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	93
1. KESIMPULAN	93
2. REKOMENDASI.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pengadilan Negeri.....	3
Tabel 2.2 Klasifikasi Pengadilan Tinggi.....	4
Tabel 2.3 Jumlah Pengadilan Khusus	4
Tabel 2.4 Perkara Gugatan	5
Tabel 2.5 Perkara Permohonan	7
Tabel 2.6 Perkara Gugatan Sederhana	8
Tabel 2.7 Perkara Gugatan Perlawanan/Bantahan	9
Tabel 2.8. Perkara Berhasil Mediasi	10
Tabel 2.9 Perkara Niaga	11
Tabel 2.10 Perkara PHI	12
Tabel 2.11 Perkara Pidana Biasa.....	13
Tabel 2.12 Pidana Singkat.....	14
Tabel 2.13 Perkara Pidana Cepat	15
Tabel 2.14 Perkara TIPIKOR.....	17
Tabel 2.15 Perkara Pidana Khusus Anak	18
Tabel 2.16 Perkara Khusus Perikanan.....	19
Tabel 2.17 Perkara Praperadilan	19
Tabel 2.18 Pelaku Tindak Pidana.....	20
Tabel 2.19 Pelaku Tipikor	21
Tabel 2.20 Pelaku Tindak Pidana Anak	22
Tabel 2.21 Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Anak	23
Tabel 2.22 Perkara Lalu Lintas	24
Tabel 2.23 Statistik E-Court.....	25
Tabel 2.24 Perkara Pengadilan Tinggi	26
Tabel 2.25 Perkara Pidana Pengadilan Tinggi	26
Tabel 2.26 Rerata Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri	27
Tabel 2.27 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus.....	28

Tabel 2.28 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana.....	29
Tabel 2.29 Rerata Waktu Perkara Pidana Khusus.....	30
Tabel 2.30 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Tinggi	31
Tabel 2.31 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Tinggi	32
Tabel 2.32 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi	33
Tabel 2.33 Posbakum	34
Tabel 2.34 Sidang Diluar Gedung.....	37
Tabel 2.35 Pembebasan Biaya Perkara	38
Tabel 2.36 Restorative Justice.....	39
Tabel 2.37 Penghargaan E-litigasi	41
Tabel 2.38 Pemenang Lomba Posbakum	42
Tabel 2.39 Pemenang Lomba Sidang Diluar Gedung.....	43
Tabel 2.40 Pemenang Lomba Prodeo	43
Tabel 3.1 Hakim Pergender.....	44
Tabel 3.2 Kenaikan Pangkat Hakim.....	45
Tabel 3.3 Hakim Karir	45
Tabel 3.4 Hakim Ad Hoc	45
Tabel 3.5 Promosi dan Mutasi Hakim PN.....	46
Tabel 3.6 Promosi dan Mutasi Hakim PT	46
Tabel 3.7 Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc	46
Tabel 3.8 Hukdis Hakim	47
Tabel 3.9 Pensiun, Diberhentikan dan Meniggal Dunia Hakim	47
Tabel 3.10 Diklat Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	48
Tabel 3.11 Diklat Hakim Oleh Litbang.....	49
Tabel 3.12 Data Kepniteraan Pergender	50
Tabel 3.13 Kenaikan Pangkat Panitera	50
Tabel 3.14 Promosi dan Mutasi Panitera	51
Tabel 3.15 Hukdis Panitera	51

Tabel 3.16 Pensiun dan Meninggal	51
Tabel 3.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural	52
Tabel 3.18 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	53
Tabel 3.19 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 3.20 Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar	54
Tabel 3.21 Kenaikan Pangkat.....	54
Tabel 3. 22 Kegiatan Bimtek Ditjen Badilum	56
Tabel 3. 23 Bimtek Oleh Litbang.....	61
Tabel 3.24 Penghargaan Lomba Pengadilan	63
Tabel 4.1 Pagu.....	64
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran.....	65
Tabel 4.3 Tanah.....	68
Tabel 4.4 Gedung dan Bangunan	69
Tabel 4.5 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua.....	70
Tabel 4.6 Kendaraan Dinas Operasional Roda empat.....	71
Tabel 4.7 Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam	71
Tabel 4.8 Peralatan dan Mesin	72
Tabel 4.9 Pengadaan Sarpras Belanja Modal.....	73
Tabel 4.10 Pembangunan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan	73
Tabel 4.11 Pengadaan Kebutuhan Perkantoran (Belanja Barang)	74
Tabel 4.12 Layanan Rapat.....	74
Tabel 4.13 Perbaikan/Prasarana Kantor	75
Tabel 4.14 Perawatan Peralatan Kantor	75
Tabel 4.15 Surat Masuk	76
Tabel 4.16 Surat Keluar	77
Tabel 4.17 Penomoran Surat	77
Tabel 4.18 Pemeliharaan.....	78
Tabel 4.19 Pemutakhiran.....	79
Tabel 5.1 Penghargaan PTSP	84

Tabel 5.2 Sarpras Disabilitas.....	88
Tabel 5.3 Statistik Disabilitas Berperkara.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Peluncuran Apliaksi Satu Jari.....	84
Gambar 5. 2 Ampuh.....	86
Gambar 5. 3 Study Visit Pelayanan	90

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan layanan peradilan melalui program kegiatan yang berorientasi pada proses dan hasil secara terus menerus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu unit eselon I yang melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis serta pembinaan kepada satuan kerja di daerah (pengadilan).

Dalam perkembangannya dukungan teknis yang diberikan salah satunya adalah program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang merupakan bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Program ini adalah penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibangun sejak tahun 2015.

Dukungan lain yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi atau disebut dengan Satu Jari yang didalamnya berisikan pemantauan eksekusi, penyerapan anggaran, pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan akan dilanjutkan pada tahap pengembangan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga mengeluarkan kebijakan UMK Cerdas KUM yang menyatukan program posbakum dengan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai nomor izin usaha. Inovasi ini berdampak terhadap terlindunginya hak pelaku usaha mikro

adalah bagian dari masyarakat tidak mampu dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dalam pemberian *reward* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga mengadakan lomba setiap tahunnya yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta hakim dan panitera bertujuan untuk memberikan *stimulan* kepada Pengadilan agar senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pencari keadilan.

BAB II KEADAAN PERKARA

1. Jumlah Pengadilan

A. Jumlah Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) wilayah Hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana berikut:

NO	Pengadilan Tinggi	Tipe	Pengadilan Negeri				Jumlah
			Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
1	Banda Aceh	B	-	1	3	18	22
2	Medan	A	1	1	11	7	20
3	Padang	A	-	1	2	13	16
4	Riau	B	-	2	4	5	11
5	Kepulauan Riau	B	-	2	-	2	4
6	Jambi	B	-	1	1	8	10
7	Palembang	A	1	1	4	4	10
8	Bengkulu	B	-	1	1	7	9
9	Tanjung Karang	A	-	1	3	7	11
10	Bangka Belitung	B	-	1	1	3	5
11	DKI-Jakarta	A	5	-	-	-	5
12	Bandung	A	2	6	11	4	23
13	Jawa Tengah	A	2	6	24	3	35
14	Yogyakarta	B	-	2	2	1	5
15	Surabaya	A	2	8	15	10	35
16	Banten	B	1	1	-	2	4
17	Denpasar	A	-	1	3	4	8
18	Nusa Tenggara	B	-	1	3	2	6
19	Kupang	B	-	1	1	14	16
20	Pontianak	B	-	1	2	7	10
21	Palangkaraya	B	-	1	2	8	11
22	Banjarmasin	A	-	1	4	8	13
23	Kalimantan Timur	B	-	2	1	6	9
24	Kalimantan Utara	B	-	-	2	2	4
25	Manado	B	-	1	3	4	8
26	Sulawesi Tengah	B	-	1	1	5	7
27	Makassar	A	1	2	5	15	23
28	Sulawesi Barat	B	-	1	-	3	4
29	Sulawesi Tenggara	B	-	1	2	6	9
30	Gorontalo	B	-	1	1	2	4
31	Ambon	B	-	1	-	7	8
32	Maluku Utara	B	-	1	-	5	6
33	Jayapura	B	-	1	-	6	7
34	Papua Barat	B	-	-	2	2	4
Total			15	53	114	200	382

Tabel 2.1 Jumlah Pengadilan Negeri

B. Klasifikasi Pengadilan Tinggi

1	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi A	:	11	Pengadillaan
2	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi B	:	23	Pengadillaan

Tabel 2.2 Klasifikasi Pengadilan Tinggi

C. Jumlah Pengadilan Khusus

1	A	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tk. Banding (Tipikor)	:	34	Pengadillaan
	B	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tk. Pertama (Tipikor)	:	33	Pengadillaan
2		Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	:	34	Pengadillaan
3		Pengadilan Niaga	:	5	Pengadillaan
4		Pengadilan HAM	:	4	Pengadillaan
5		Pengadilan Perikanan	:	10	Pengadillaan

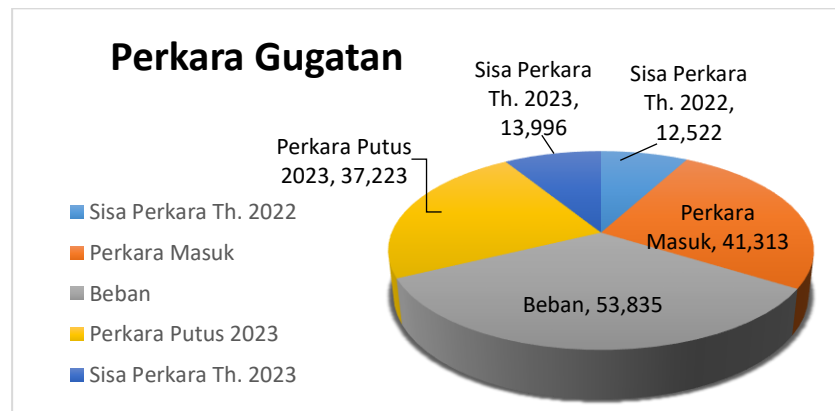
Tabel 2.3 Jumlah Pengadilan Khusus

2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan

A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

A.1 Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Gugatan



Gambar 2. 1 Perkara Gugatan

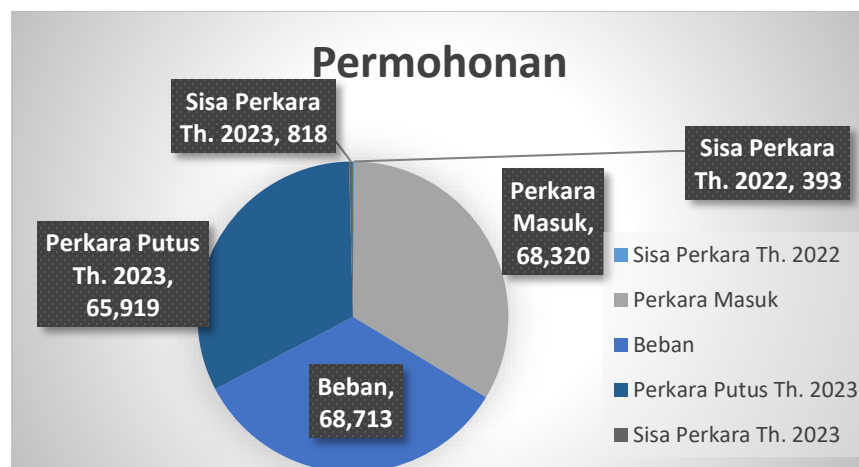
- Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan

NO	Pengadilan Tinggi	Gugatan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	101	333	434	21	290	123	118	80	20
2	Medan	895	2,977	3,872	197	2,661	1,014	630	429	109
3	Padang	368	745	1,113	64	675	374	286	218	26
4	Riau	293	871	1,164	44	769	351	169	106	37
5	Jambi	141	503	644	53	393	198	135	99	10
6	Palembang	211	567	778	36	548	194	161	114	27
7	Bengkulu	56	157	213	7	145	61	36	21	3
8	Tanjung Karang	171	650	821	39	582	200	111	78	13
9	Bangka Belitung	36	212	248	11	198	39	26	15	2
10	Jakarta	2,063	4,794	6,857	333	4,414	2,110	1,109	695	149
11	Bandung	1,274	3,664	4,938	221	3,319	1,398	710	469	122
12	Semarang	859	3,103	3,962	302	2,688	972	492	305	53
13	Yogyakarta	180	625	805	31	544	230	100	59	14
14	Surabaya	1,340	4,314	5,654	424	3,751	1,479	812	556	127
15	Banten	765	1,652	2,417	46	1,520	851	261	186	45
16	Denpasar	527	3,884	4,411	128	3,561	722	272	173	39
17	Mataram	229	668	897	88	588	221	211	131	55
18	Kupang	242	917	1,159	51	800	308	166	102	38
19	Pontianak	160	786	946	71	699	176	124	59	19
20	Palangkaraya	148	624	772	30	580	162	105	62	17
21	Banjarmasin	118	699	817	25	672	120	85	56	11
22	Samarinda	302	1,031	1,333	76	888	369	233	159	32
23	Manado	408	2,372	2,780	33	2,222	525	194	146	28
24	Palu	153	632	785	37	567	181	106	62	20
25	Makassar	574	1,482	2,056	73	1,413	570	406	299	82
26	Kendari	122	332	454	21	322	111	116	88	21
27	Gorontalo	53	210	263	13	164	86	51	26	6
28	Ambon	120	494	614	20	466	128	81	50	23
29	Maluku Utara	52	301	353	20	255	78	53	39	6
30	Jayapura	277	646	923	17	574	332	68	39	8
31	Kepulauan Riau	153	573	726	61	506	159	99	53	16
32	Kalimantan Utara	43	126	169	5	124	40	27	17	4
33	Sulawesi Barat	29	137	166	1	127	38	29	18	5
34	Papua Barat	59	232	291	17	198	76	37	28	0
Total		12,522	41,313	53,835	2,616	37,223	13,996	7,619	5,037	1,187

Tabel 2.4 Perkara Gugatan

Berdasarkan data diatas jumlah perkara gugatan yang masuk sebanyak 41.313 perkara dimana sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 12.522 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2023 sebesar 53.835 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil diputus sebanyak 37.223 perkara, sehingga persentase penyelesaian perkara pada tahun 2023 sebesar 72 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 71 % sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara meningkat sebesar 2%.

b. Permohonan



Gambar 2. 2 Permohonan

Jumlah perkara permohonan yang masuk tahun 2023 yang masuk sebanyak 68.320 perkara, dimana sisa perkara tahun 2022 sebanyak 513 sehingga beban perkara pada tahun 2023 sebanyak 68.833 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil diputus sebanyak 65.919 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 98 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase

penyelesaian perkara sebesar 96 % sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara meningkat 2%.

- Rekapitulasi Perkara Permohonan

NO	Pengadilan Tinggi	Permohonan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	4	2,231	2,235	14	2,204	17	0	1	0
2	Medan	16	4,101	4,117	86	3,995	36	0	3	0
3	Padang	18	1,203	1,221	23	1,166	32	0	0	0
4	Riau	17	1,159	1,176	15	1,159	2	0	3	0
5	Jambi	18	506	524	9	506	9	0	1	0
6	Palembang	13	882	895	8	871	16	0	0	0
7	Bengkulu	2	442	444	5	431	8	0	0	0
8	Tanjung Karang	9	1,295	1,304	28	1,257	19	0	0	0
9	Bangka Belitung	7	352	359	1	355	3	0	1	0
10	Jakarta	89	5,599	5,688	258	5,327	103	0	14	0
11	Bandung	16	6,822	6,838	138	6,670	30	0	6	0
12	Semarang	5	6,560	6,565	203	6,298	64	0	5	0
13	Yogyakarta	35	3,006	3,041	84	2,845	112	0	1	0
14	Surabaya	55	11,109	11,164	627	10,397	140	0	8	0
15	Banten	41	2,359	2,400	38	2,308	54	0	3	0
16	Denpasar	15	2,347	2,362	92	2,208	62	0	1	0
17	Mataram	19	754	773	26	732	15	0	0	0
18	Kupang	23	1,868	1,891	41	1,806	44	0	0	0
19	Pontianak	1	2,377	2,378	101	2,272	5	0	0	0
20	Palangkaraya	0	581	581	6	571	4	0	1	0
21	Banjarmasin	0	1,281	1,281	6	1,271	4	0	0	0
22	Samarinda	15	1,152	1,167	29	1,124	14	0	3	0
23	Manado	2	2,213	2,215	20	2,171	24	0	2	0
24	Palu	5	252	257	2	254	1	0	0	0
25	Makassar	22	2,803	2,825	34	2,744	47	0	0	0
26	Kendari	14	453	467	11	442	14	0	0	0
27	Gorontalo	4	193	197	14	177	6	0	0	0
28	Ambon	2	372	374	3	371	0	0	0	0
29	Maluku Utara	5	292	297	1	293	3	0	0	0
30	Jayapura	7	1,765	1,772	17	1,744	11	0	4	0
31	Kepulauan Riau	22	883	905	18	855	32	0	3	0
32	Kalimantan Utara	10	255	265	3	259	3	0	0	0
33	Sulawesi Barat	1	255	256	4	252	0	0	0	0
34	Papua Barat	1	598	599	11	584	4	0	0	0
Total		513	68,320	68,833	1,976	65,919	938	0	60	0

Tabel 2.5 Perkara Permohonan

c. Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Gugatan Sederhana						
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan
1	Banda Aceh	0	35	35	3	29	3	4
2	Medan	15	203	218	9	174	35	26
3	Padang	27	249	276	16	252	8	22
4	Riau	11	139	150	9	129	12	16
5	Jambi	20	244	264	15	238	11	6
6	Palembang	65	466	531	27	474	30	14
7	Bengkulu	3	68	71	5	62	4	4
8	Tanjung Karang	7	140	147	5	132	10	5
9	Bangka Belitung	1	58	59	2	57	0	4
10	Jakarta	18	138	156	9	125	22	25
11	Bandung	43	697	740	39	646	55	34
12	Semarang	53	1,771	1,824	169	1,561	94	44
13	Yogyakarta	8	119	127	9	108	10	7
14	Surabaya	56	1,186	1,242	117	1,021	104	52
15	Banten	37	198	235	10	175	50	17
16	Denpasar	5	56	61	4	52	5	4
17	Mataram	7	85	92	7	82	3	6
18	Kupang	4	109	113	6	92	15	15
19	Pontianak	2	50	52	8	42	2	7
20	Palangkaraya	5	58	63	7	53	3	6
21	Banjarmasin	4	100	104	1	95	8	6
22	Samarinda	4	71	75	1	69	5	8
23	Manado	9	302	311	10	286	15	38
24	Palu	10	112	122	4	95	23	6
25	Makassar	22	127	149	10	126	13	16
26	Kendari	3	33	36	1	32	3	5
27	Gorontalo	0	39	39	1	34	4	5
28	Ambon	0	34	34	0	31	3	1
29	Maluku Utara	1	44	45	2	39	4	9
30	Jayapura	15	53	68	2	62	4	3
31	Kepulauan Riau	6	52	58	8	48	2	12
32	Kalimantan Utara	0	4	4	0	4	0	0
33	Sulawesi Barat	1	6	7	0	7	0	0
34	Papua Barat	1	20	21	1	19	1	2
Total		463	7,066	7,529	517	6,451	561	429

Tabel 2.6 Perkara Gugatan Sederhana

d. Jumlah Perkara Perdata Gugatan Perlawanan/Bantahan
pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Perlawanan/Bantahan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	10	23	33	1	25	7	13	15	0
2	Medan	32	66	98	7	56	35	20	16	2
3	Padang	14	39	53	2	27	24	11	9	0
4	Riau	19	26	45	1	31	13	19	17	0
5	Jambi	1	8	9	1	5	3	1	2	1
6	Palembang	9	18	27	2	21	4	7	5	1
7	Bengkulu	7	4	11	0	8	3	4	2	0
8	Tanjung Karang	8	15	23	1	16	6	5	2	1
9	Bangka Belitung	1	4	5	1	4	0	1	1	0
10	Jakarta	50	104	154	6	93	55	45	25	6
11	Bandung	53	149	202	16	108	78	61	36	11
12	Semarang	40	119	159	16	101	42	40	30	4
13	Yogyakarta	9	16	25	2	14	9	7	4	0
14	Surabaya	70	164	234	21	146	67	78	54	6
15	Banten	18	52	70	3	39	28	15	3	0
16	Denpasar	21	60	81	8	46	27	22	13	0
17	Mataram	13	40	53	3	27	23	12	10	1
18	Kupang	9	14	23	3	10	10	6	3	1
19	Pontianak	3	20	23	3	13	7	10	4	0
20	Palangkaraya	3	16	19	3	9	7	5	3	0
21	Banjarmasin	0	1	1	0	1	0	0	0	0
22	Samarinda	4	27	31	2	18	11	10	10	0
23	Manado	9	34	43	2	29	12	13	4	1
24	Palu	7	8	15	0	13	2	7	6	1
25	Makassar	33	56	89	6	70	13	49	25	5
26	Kendari	5	4	9	1	6	2	6	4	0
27	Gorontalo	1	6	7	0	4	3	2	1	0
28	Ambon	1	11	12	1	6	5	3	0	0
29	Maluku Utara	0	6	6	2	4	0	2	0	0
30	Jayapura	5	8	13	0	4	9	3	4	0
31	Kepulauan Riau	8	15	23	3	11	9	6	5	1
32	Kalimantan Utara	1	0	1	0	1	0	1	0	0
33	Sulawesi Barat	1	8	9	0	5	4	3	4	0
34	Papua Barat	2	7	9	2	4	3	0	0	0
Total		467	1,148	1,615	119	975	521	487	317	42

Tabel 2.7 Perkara Gugatan Perlawanan/Bantahan

e. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

NO	Pengadilan Tinggi	Mediasi				
		Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Banda Aceh	241	29	212	83	16
2	Medan	1,350	79	1,271	1,592	79
3	Padang	522	27	495	211	36
4	Riau	435	32	403	427	30
5	Jambi	289	22	267	206	16
6	Palembang	309	31	278	254	16
7	Bengkulu	81	5	76	73	7
8	Tanjung Karang	318	12	306	327	15
9	Bangka Belitung	74	8	66	140	3
10	Jakarta	2,201	148	2,053	2,475	207
11	Bandung	1,834	154	1,680	1,792	169
12	Semarang	1,653	219	1,434	1,469	99
13	Yogyakarta	344	40	304	277	20
14	Surabaya	2,335	281	2,054	1,971	170
15	Banten	776	66	710	863	57
16	Denpasar	939	74	865	2,931	76
17	Mataram	461	23	438	216	20
18	Kupang	490	34	456	409	31
19	Pontianak	296	21	275	490	14
20	Palangkaraya	256	11	245	360	23
21	Banjarmasin	209	18	191	476	12
22	Samarinda	482	18	464	554	21
23	Manado	586	36	550	1,785	35
24	Palu	261	30	231	369	10
25	Makassar	826	32	794	670	40
26	Kendari	209	8	201	116	10
27	Gorontalo	137	10	127	69	6
28	Ambon	213	9	204	274	12
29	Maluku Utara	137	16	121	159	5
30	Jayapura	261	20	241	380	13
31	Kepulauan Riau	218	20	198	350	17
32	Kalimantan Utara	57	2	55	66	2
33	Sulawesi Barat	61	3	58	79	4
34	Papua Barat	119	7	112	118	4
Total		18,980	1,545	17,435	22,031	1,295

Tabel 2.8. Perkara Berhasil Mediasi

A.2 Jumlah Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri

a. Jumlah Perkara Niaga

- Perkara Pailit

NO	Pengadilan Negeri	Pailit									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0
2	Jakarta	2	51	53	4	49	0	0	0	9	0
3	Semarang	8	12	20	2	11	7	0	0	1	0
4	Surabaya	2	18	20	2	14	4	0	0	0	0
5	Makassar	4	4	8	0	1	7	0	0	0	0
Total		16	94	110	8	84	18	0	0	10	0

- Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran zUtang (PKPU)

NO	Pengadilan Negeri	PKPU									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	6	52	58	3	49	6	0	0	3	0
2	Jakarta	72	419	491	82	340	69	0	0	11	0
3	Semarang	7	44	51	2	40	9	0	0	1	0
4	Surabaya	23	119	142	13	107	22	0	0	10	0
5	Makassar	4	18	22	1	19	2	0	0	2	0
Total		112	652	764	101	555	108	0	0	27	0

- Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

NO	Pengadilan Negeri	PKPU									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	1	5	6	1	3	2	0	1	0	0
2	Jakarta	12	123	135	11	120	4	0	59	8	0
3	Semarang	1	6	7	0	3	4	0	3	1	0
4	Surabaya	3	13	16	3	12	1	0	6	1	0
5	Makassar	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0
Total		18	148	166	15	139	12	0	70	10	0

Tabel 2.9 Perkara Niaga

b. Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

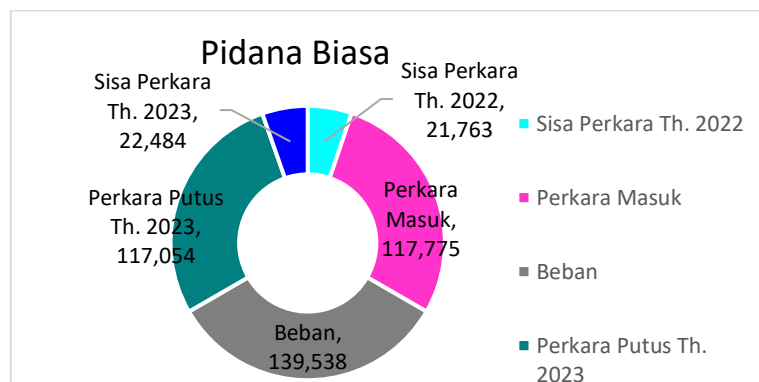
NO	Pengadilan Negeri	PHI							
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Kasasi
1	Banda Aceh	3	16	19	0	10	9	0	8
2	Medan	92	291	383	2	302	79	0	193
3	Padang	7	42	49	2	38	9	0	24
4	Pekanbaru	15	84	99	1	76	22	0	52
5	Jambi	10	22	32	3	23	6	0	14
6	Palembang	56	133	189	0	135	54	0	49
7	Bengkulu	2	6	8	0	7	1	0	4
8	Tanjung Karang	14	32	46	0	34	12	0	20
9	Pangkalpinang	6	16	22	1	16	5	0	6
10	Jakarta Pusat	158	369	527	20	383	124	0	189
11	Bandung	47	226	273	13	190	70	0	99
12	Semarang	18	93	111	7	83	21	0	44
13	Yogyakarta	2	53	55	4	38	13	0	16
14	Surabaya	45	122	167	6	141	20	0	70
15	Gresik	1	11	12	0	10	2	0	4
16	Serang	28	119	147	3	111	33	0	45
17	Denpasar	6	19	25	2	18	5	0	10
18	Mataram	3	20	23	2	20	1	0	13
19	Kupang	2	19	21	0	21	0	0	17
20	Pontianak	11	45	56	2	45	9	0	25
21	Palangkaraya	8	27	35	1	21	13	0	11
22	Banjarmasin	6	26	32	0	27	5	0	18
23	Samarinda	20	43	63	0	55	8	0	22
24	Manado	4	20	24	1	21	2	0	11
25	Palu	3	9	12	2	8	2	0	5
26	Makassar	17	39	56	2	51	3	0	24
27	Kendari	2	23	25	0	24	1	0	10
28	Gorontalo	11	19	30	4	16	10	0	12
29	Ambon	3	5	8	0	4	4	0	2
30	Ternate	5	23	28	0	4	24	0	3
31	Jayapura	2	18	20	0	20	0	0	9
32	Tanjung Pinang	11	28	39	1	30	8	0	32
33	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Manokwari	3	4	7	0	4	3	0	1
Total		621	2,022	2,643	79	1,986	578	0	1,062

Tabel 2.10 Perkara PHI

A.3 Jumlah Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Jumlah Perkara Pidana

- Pidana Biasa



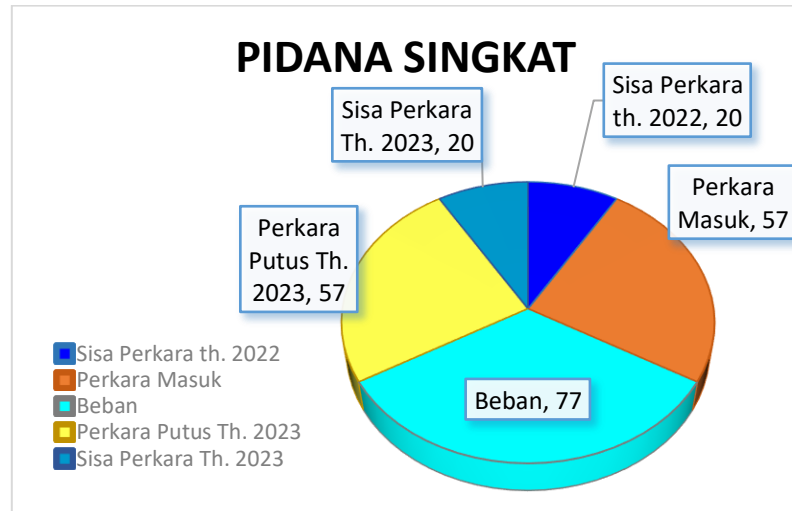
Gambar 2. 3 Pidana Biasa

- Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Biasa								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	577	3,195	3,772	0	3,183	589	623	10	9
2	Medan	2,946	12,054	15,000	0	11,491	3,509	2,074	189	6
3	Padang	629	3,204	3,833	0	3,244	589	519	74	0
4	Riau	1,062	6,471	7,533	0	6,366	1,167	768	309	9
5	Jambi	104	2,569	2,673	0	2,572	101	309	5	1
6	Palembang	799	6,023	6,822	0	5,983	839	371	17	1
7	Bengkulu	233	1,483	1,716	0	1,499	217	226	12	1
8	Tanjung Karang	583	4,163	4,746	0	4,225	521	356	16	0
9	Bangka Belitung	100	1,351	1,451	0	1,379	72	102	217	9
10	Jakarta	1,560	4,946	6,506	0	5,022	1,484	399	80	3
11	Bandung	1,550	9,803	11,353	0	9,386	1,967	453	47	1
12	Semarang	934	7,292	8,226	0	7,169	1,057	942	43	1
13	Yogyakarta	272	1,963	2,235	0	1,904	331	138	13	1
14	Surabaya	2,617	13,068	15,685	0	13,537	2,148	1,628	287	0
15	Banten	1,356	3,713	5,069	0	3,687	1,382	190	13	0
16	Denpasar	362	1,847	2,209	0	1,896	313	145	150	0
17	Mataram	263	2,095	2,358	0	1,987	371	226	8	1
18	Kupang	159	1,390	1,549	0	1,362	187	203	13	0
19	Pontianak	606	3,238	3,844	0	3,338	506	457	32	3
20	Palangkaraya	301	2,260	2,561	0	2,316	245	268	23	0
21	Banjarmasin	287	3,799	4,086	0	3,804	282	333	10	2
22	Samarinda	827	3,996	4,823	0	3,912	911	259	15	1
23	Manado	346	1,597	1,943	0	1,590	353	144	7	0
24	Palu	299	1,822	2,121	0	1,784	337	199	24	0
25	Makassar	1,115	5,350	6,465	0	5,277	1,188	1,297	26	0
26	Kendari	121	1,676	1,797	0	1,699	98	223	24	0
27	Gorontalo	113	661	774	0	630	144	127	3	0
28	Ambon	233	790	1,023	0	807	216	153	1	0
29	Maluku Utara	125	611	736	0	629	107	85	5	0
30	Jayapura	660	1,266	1,926	0	1,300	626	131	1	0
31	Kepulauan Riau	274	1,596	1,870	0	1,604	266	148	13	1
32	Kalimantan	189	1,053	1,242	0	1,117	125	88	6	0
33	Sulawesi Barat	94	788	882	0	753	129	219	5	0
34	Papua Barat	67	642	709	0	602	107	59	2	0
Total		21,763	117,775	139,538	0	117,054	22,484	13,862	1,700	50

Tabel 2.11 Perkara Pidana Biasa

- Pidana Singkat



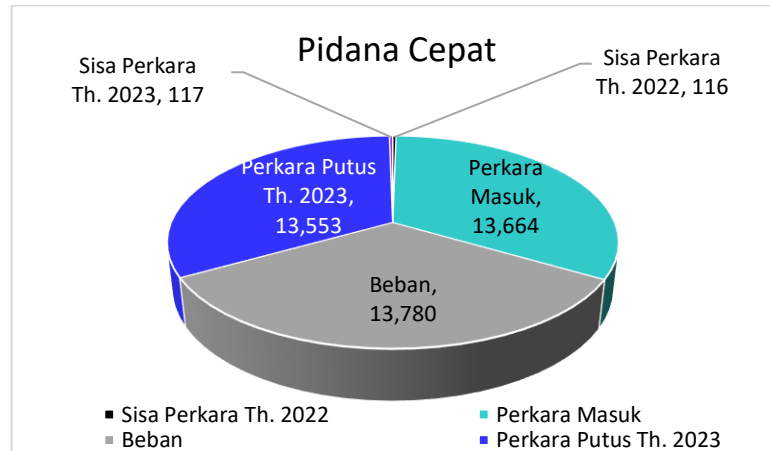
Gambar 2. 4 Pidana Singkat

- Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Singkat								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	Medan	0	1	1	0	1	0	1	0	0
3	Padang	0	1	1	0	1	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	4	4	0	4	0	0	0	0
6	Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	2	2	0	2	0	0	0	0
8	Tanjung Karang	0	1	1	0	1	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	1	0	1	0	0	1	0	0	0
10	Jakarta	0	8	8	0	8	0	0	0	0
11	Bandung	0	6	6	0	6	0	0	0	0
12	Semarang	0	2	2	0	2	0	0	0	0
13	Yogyakarta	0	12	12	0	12	0	0	0	0
14	Surabaya	3	1	4	0	1	3	0	0	0
15	Banten	3	0	3	0	0	3	0	0	0
16	Denpasar	0	3	3	0	3	0	0	0	0
17	Mataram	1	4	5	0	4	1	0	0	0
18	Kupang	2	0	2	0	0	2	0	0	0
19	Pontianak	0	3	3	0	3	0	0	0	0
20	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Banjarmasin	0	2	2	0	2	0	0	0	0
22	Samarinda	1	1	2	0	1	1	0	0	0
23	Manado	1	1	2	0	1	1	0	0	0
24	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Makassar	7	0	7	0	0	7	0	0	0
26	Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ambon	0	3	3	0	3	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	1	1	0	1	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	1	1	0	1	0	1	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		20	57	77	0	57	20	2	0	0

Tabel 2.12 Pidana Singkat

- Pidana Cepat



Gambar 2. 5 Pidana Cepat

- Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Cepat								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	1	475	476	0	475	1	1	0	0
2	Medan	13	1,436	1,449	0	1,436	13	13	2	0
3	Padang	2	308	310	0	308	2	4	0	0
4	Riau	3	904	907	0	904	3	2	0	0
5	Jambi	8	248	256	0	248	8	0	0	0
6	Palembang	1	247	248	0	247	1	1	0	0
7	Bengkulu	1	83	84	0	83	1	0	0	0
8	Tanjung Karang	2	83	85	0	83	2	0	0	0
9	Bangka Belitung	1	16	17	0	16	1	0	0	0
10	Jakarta	8	1,159	1,167	0	1,159	8	0	1	0
11	Bandung	1	880	881	0	880	1	10	0	0
12	Semarang	15	513	528	0	513	15	1	0	0
13	Yogyakarta	2	295	297	0	295	2	1	0	0
14	Surabaya	13	4,877	4,890	0	4,877	13	4	1	0
15	Banten	1	136	137	0	136	1	1	0	0
16	Denpasar	1	61	62	0	61	1	0	0	0
17	Mataram	1	147	148	0	146	2	4	0	0
18	Kupang	1	20	21	0	20	1	0	0	0
19	Pontianak	1	224	225	0	224	1	4	0	0
20	Palangkaraya	1	105	106	0	105	1	0	0	0
21	Banjarmasin	13	459	472	0	459	13	0	0	0
22	Samarinda	6	227	233	0	227	6	0	0	0
23	Manado	4	79	83	0	79	4	2	0	0
24	Palu	3	19	22	0	19	3	0	0	0
25	Makassar	2	141	143	0	141	2	2	0	0
26	Kendari	1	32	33	0	32	1	0	0	0
27	Gorontalo	1	29	30	0	29	1	0	0	0
28	Ambon	1	69	70	0	69	1	0	0	0
29	Maluku Utara	1	77	78	0	77	1	0	0	0
30	Jayapura	7	190	197	0	190	7	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	48	48	0	48	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	0	32	32	0	32	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	14	14	0	14	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	31	31	0	31	0	0	0	0
Total		116	13,664	13,780	0	13,663	117	50	4	0

Tabel 2.13 Perkara Pidana Cepat

Berdasarkan data diatas untuk perkara pidana biasa jumlah perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak 117.775 perkara dimana sisa perkara tahun 2022 sebanyak 21.763 Perkara sehingga beban perkara pidana biasa tahun 2023 sebanyak 139.538 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil putus Sebanyak 117.054 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 83 %. Dibanding dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 84%, sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara menurun sebesar 1%.

Sedangkan untuk pidana singkat jumlah perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak 57 perkara dimana sisa perkara tahun 2022 sebanyak 20 perkara. Sehingga beban perkara pidana singkat tahun 2023 sebanyak 77 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil diputus sebanyak 57 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 74 %, dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 84 %. Sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara menurun besar 10 %.

Untuk pidana cepat jumlah perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak 13.664 perkara dimana sisa perkara tahun 2022 sebanyak 116 perkara sehingga beban perkara pidana cepat tahun 2023 sebanyak 13.780 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil diputus sebanyak 13.663 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 99%. Dibanding dengan tahun sebelumnya

persentase penyelesaian perkara sebesar 99%, sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara sama besarnya dari tahun sebelumnya.

b. Jumlah Perkara Pidana Khusus

- Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

NO	Pengadilan Tinggi	Tindak Pidana Korupsi									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	35	74	109	0	81	28	37	44	10	0
2	Medan	55	154	209	0	123	86	36	42	5	0
3	Padang	16	55	71	0	38	33	17	23	3	0
4	Riau	36	68	104	0	65	39	29	33	6	0
5	Jambi	10	40	50	0	32	18	13	8	5	0
6	Palembang	15	80	95	0	72	23	30	28	12	0
7	Bengkulu	13	57	70	0	48	22	7	7	1	0
8	Tanjung Karang	26	49	75	0	53	22	23	13	4	0
9	Bangka Belitung	38	41	79	0	45	34	24	15	5	0
10	Jakarta	34	122	156	0	111	45	75	67	6	0
11	Bandung	97	121	218	0	123	95	64	64	11	0
12	Semarang	11	92	103	0	102	1	38	30	14	0
13	Yogyakarta	193	14	207	0	21	186	14	9	0	0
14	Surabaya	20	149	169	0	165	4	86	81	15	1
15	Banten	25	45	70	0	53	17	42	39	6	0
16	Denpasar	20	29	49	0	34	15	27	26	2	0
17	Mataram	17	37	54	0	30	24	12	19	5	0
18	Kupang	78	76	154	0	63	91	24	22	8	1
19	Pontianak	15	54	69	0	66	3	17	20	3	0
20	Palangkaraya	31	31	62	0	45	17	12	21	4	0
21	Banjarmasin	17	40	57	0	47	10	14	12	4	0
22	Samarinda	15	68	83	0	55	28	23	19	14	0
23	Manado	12	34	46	0	38	8	20	19	6	0
24	Palu	21	41	62	0	58	4	54	44	10	0
25	Makassar	25	149	174	0	142	32	94	92	10	0
26	Kendari	26	47	73	0	38	35	10	10	7	0
27	Gorontalo	15	35	50	0	42	8	28	24	2	0
28	Ambon	30	63	93	0	53	40	28	25	7	0
29	Maluku Utara	14	32	46	0	29	17	14	16	1	0
30	Jayapura	17	40	57	0	36	21	5	8	0	0
31	Kepulauan Riau	17	34	51	0	32	19	20	16	3	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	16	26	42	0	29	13	15	20	0	0
34	Papua Barat	3	37	40	0	28	12	20	10	4	0
Total		1,013	2,034	3,047	0	1,997	1,050	972	926	193	2

Tabel 2.14 Perkara TIPIKOR

- Perkara Pidana Khusus Anak

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Khusus Anak									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	54	61	115	0	60	55	5	3	0	0
2	Medan	68	477	545	0	477	68	70	41	3	0
3	Padang	20	172	192	0	172	20	12	4	0	0
4	Riau	25	217	242	0	210	32	28	9	2	0
5	Jambi	20	123	143	0	122	21	14	6	0	0
6	Palembang	28	314	342	0	307	35	23	13	0	0
7	Bengkulu	20	170	190	0	171	19	10	5	0	0
8	Tanjung Karang	54	285	339	0	286	53	21	12	0	0
9	Bangka Belitung	6	79	85	0	78	7	7	3	0	0
10	Jakarta	46	129	175	0	126	49	9	3	0	0
11	Bandung	47	407	454	0	398	56	25	16	0	0
12	Semarang	32	339	371	0	331	40	22	14	1	0
13	Yogyakarta	20	142	162	0	138	24	8	7	0	0
14	Surabaya	92	396	488	0	404	84	38	27	0	2
15	Banten	40	174	214	0	175	39	14	7	0	0
16	Denpasar	16	38	54	0	40	14	2	2	0	0
17	Mataram	15	148	163	0	138	25	18	7	0	0
18	Kupang	11	79	90	0	76	14	11	6	1	0
19	Pontianak	13	109	122	0	112	10	8	5	1	0
20	Palangkaraya	4	63	67	0	60	7	7	7	0	0
21	Banjarasin	12	118	130	0	113	17	14	2	0	0
22	Samarinda	31	122	153	0	121	32	6	2	0	0
23	Manado	17	106	123	0	107	16	15	7	0	0
24	Palu	21	50	71	0	50	21	4	4	0	0
25	Makassar	45	272	317	0	275	42	50	28	0	0
26	Kendari	15	152	167	0	148	19	17	6	0	0
27	Gorontalo	17	27	44	0	25	19	5	2	0	0
28	Ambon	23	44	67	0	46	21	6	2	0	0
29	Maluku Utara	1	29	30	0	29	1	4	1	0	0
30	Jayapura	12	103	115	0	103	12	11	6	0	0
31	Kepulauan Riau	4	108	112	0	107	5	5	0	0	0
32	Kalimantan Utara	7	47	54	0	53	1	8	3	0	0
33	Sulawesi Barat	3	43	46	0	43	3	6	2	0	0
34	Papua Barat	3	46	49	0	47	2	1	1	0	0
Total		842	5,189	6,031	0	5,148	883	504	263	8	2

Tabel 2.15 Perkara Pidana Khusus Anak

- Perkara Pidana Khusus Perikanan

NO	Pengadilan Negeri	Perikanan										
		Tingkat Pertama							Upaya Hukum			
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Bandin g	Kas asi	PK	Grasi
1	Medan	1	7	8	0	7	1	0	1	2	0	0
2	Jakarta Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pontianak	1	8	9	0	8	1	0	1	0	0	0
4	Bitung	2	11	13	0	11	2	0	2	2	1	0
5	Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Merauke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Pinang	1	9	10	0	9	1	0	0	0	0	0
9	Natuna	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Sorong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		5	36	41	0	36	5	0	4	4	1	0

Tabel 2.16 Perkara Khusus Perikanan

c. Jumlah Perkara Pidana Praperadilan

NO	Pengadilan Tinggi	Praperadilan					
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir
1	Banda Aceh	8	23	31	0	22	9
2	Medan	0	193	193	0	187	6
3	Padang	8	34	42	0	29	13
4	Riau	3	66	69	0	67	2
5	Jambi	3	38	41	0	36	5
6	Palembang	4	93	97	0	97	0
7	Bengkulu	3	19	22	0	19	3
8	Tanjung Karang	5	18	23	0	15	8
9	Bangka Belitung	2	7	9	0	7	2
10	Jakarta	0	201	201	0	189	12
11	Bandung	0	97	97	0	85	12
12	Semarang	0	55	55	0	55	0
13	Yogyakarta	11	16	27	0	15	12
14	Surabaya	0	114	114	0	98	16
15	Banten	2	44	46	0	42	4
16	Denpasar	9	32	41	0	30	11
17	Mataram	5	35	40	0	28	12
18	Kupang	6	31	37	0	33	4
19	Pontianak	4	22	26	0	16	10
20	Palangkaraya	0	21	21	0	18	3
21	Banjarmasin	4	11	15	0	11	4
22	Samarinda	1	26	27	0	22	5
23	Manado	0	33	33	0	31	2
24	Palu	1	31	32	0	24	8
25	Makassar	3	70	73	0	63	10
26	Kendari	0	33	33	0	31	2
27	Gorontalo	4	18	22	0	17	5
28	Ambon	5	23	28	0	24	4
29	Maluku Utara	1	16	17	0	13	4
30	Jayapura	8	10	18	0	12	6
31	Kepulauan Riau	1	39	40	0	37	3
32	Kalimantan Utara	1	7	8	0	7	1
33	Sulawesi Barat	0	4	4	0	4	0
34	Papua Barat	2	14	16	0	14	2
Total		104	1,494	1,598	0	1,398	200

Tabel 2.17 Perkara Praperadilan

d. Jumlah Pelaku Tindak Pidana

- Pelaku Tindak Pidana Biasa

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	3,282	172	3,454
2	Medan	12,971	620	13,591
3	Padang	3,556	214	3,770
4	Riau	6,650	363	7,013
5	Jambi	2,767	171	2,938
6	Palembang	6,585	335	6,920
7	Bengkulu	1,661	94	1,755
8	Tanjung Karang	4,565	198	4,763
9	Bangka Belitung	1,494	97	1,591
10	Jakarta	5,127	469	5,596
11	Bandung	10,606	531	11,137
12	Semarang	8,154	448	8,602
13	Yogyakarta	1,949	117	2,066
14	Surabaya	14,353	825	15,178
15	Banten	3,536	184	3,720
16	Denpasar	1,947	187	2,134
17	Mataram	2,232	170	2,402
18	Kupang	1,685	100	1,785
19	Pontianak	3,639	225	3,864
20	Palangkaraya	2,593	183	2,776
21	Banjarmasin	4,086	295	4,381
22	Samarinda	4,190	324	4,514
23	Manado	1,329	129	1,458
24	Palu	1,947	159	2,106
25	Makassar	5,594	472	6,066
26	Kendari	1,835	125	1,960
27	Gorontalo	716	115	831
28	Ambon	822	75	897
29	Maluku Utara	643	59	702
30	Jayapura	1,384	85	1,469
31	Kepulauan Riau	1,762	169	1,931
32	Kalimantan Utara	1,090	100	1,190
33	Sulawesi Barat	855	48	903
34	Papua Barat	732	59	791
Total		126,337	7,917	134,254

Tabel 2.18 Pelaku Tindak Pidana

- Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana Korupsi		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	53	4	57
2	Medan	135	20	155
3	Padang	55	6	61
4	Riau	66	8	74
5	Jambi	49	8	57
6	Palembang	78	7	85
7	Bengkulu	49	11	60
8	Tanjung Karang	47	6	53
9	Bangka Belitung	36	6	42
10	Jakarta	78	8	86
11	Bandung	114	16	130
12	Semarang	88	14	102
13	Yogyakarta	9	5	14
14	Surabaya	137	23	160
15	Banten	43	2	45
16	Denpasar	26	6	32
17	Mataram	35	4	39
18	Kupang	70	12	82
19	Pontianak	52	2	54
20	Palangkaraya	33	2	35
21	Banjarmasin	36	5	41
22	Samarinda	64	9	73
23	Manado	28	7	35
24	Palu	37	6	43
25	Makassar	119	35	154
26	Kendari	45	4	49
27	Gorontalo	34	6	40
28	Ambon	52	17	69
29	Maluku Utara	30	3	33
30	Jayapura	35	7	42
31	Kepulauan Riau	31	5	36
32	Kalimantan Utara	0	0	0
33	Sulawesi Barat	24	3	27
34	Papua Barat	32	5	37
Total		1,820	282	2,102

Tabel 2.19 Pelaku Tipikor

- Pelaku Tindak Pidana Anak

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Anak		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	78	1	79
2	Medan	524	11	535
3	Padang	178	4	182
4	Riau	209	6	215
5	Jambi	138	4	142
6	Palembang	314	9	323
7	Bengkulu	202	3	205
8	Tanjung Karang	306	7	313
9	Bangka Belitung	81	3	84
10	Jakarta	144	1	145
11	Bandung	443	4	447
12	Semarang	399	5	404
13	Yogyakarta	143	2	145
14	Surabaya	445	8	453
15	Banten	193	0	193
16	Denpasar	40	4	44
17	Mataram	168	3	171
18	Kupang	70	0	70
19	Pontianak	104	2	106
20	Palangkaraya	75	1	76
21	Banjarmasin	126	2	128
22	Samarinda	119	9	128
23	Manado	94	2	96
24	Palu	47	1	48
25	Makassar	295	6	301
26	Kendari	174	2	176
27	Gorontalo	22	0	22
28	Ambon	41	0	41
29	Maluku Utara	26	1	27
30	Jayapura	101	2	103
31	Kepulauan Riau	116	4	120
32	Kalimantan Utara	52	0	52
33	Sulawesi Barat	48	1	49
34	Papua Barat	49	0	49
Total		5,564	108	5,672

Tabel 2.20 Pelaku Tindak Pidana Anak

e. Jumlah Perkara Pidana Anak berhasil Melalui Diversi

NO	Pengadilan Tinggi	Penyelesaian Perkara pidana Melalui Diversi				
		Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	JUMLAH
1	Banda Aceh	115	33	21	1	126
2	Medan	545	58	27	14	562
3	Padang	192	31	17	7	199
4	Riau	242	29	13	7	251
5	Jambi	149	26	20	2	153
6	Palembang	342	75	52	14	351
7	Bengkulu	190	24	10	9	195
8	Tanjung Karang	339	45	26	4	354
9	Bangka Belitung	85	23	9	10	89
10	Jakarta	175	67	2	1	239
11	Bandung	454	74	49	3	476
12	Semarang	371	62	31	11	391
13	Yogyakarta	162	28	20	0	170
14	Surabaya	488	143	36	13	582
15	Banten	214	45	21	13	225
16	Denpasar	54	8	5	0	57
17	Mataram	163	28	10	5	176
18	Kupang	90	13	5	2	96
19	Pontianak	122	12	2	1	131
20	Palangkaraya	67	16	2	1	80
21	Banjarmasin	130	13	4	3	136
22	Samarinda	153	21	3	2	169
23	Manado	123	34	10	8	139
24	Palu	71	7	1	2	75
25	Makassar	317	91	24	23	361
26	Kendari	167	39	16	6	184
27	Gorontalo	44	6	1	2	47
28	Ambon	67	13	4	3	73
29	Maluku Utara	30	2	0	2	30
30	Jayapura	115	19	5	7	122
31	Kepulauan Riau	112	4	4	0	112
32	Kalimantan Utara	54	3	3	0	54
33	Sulawesi Barat	46	12	2	7	49
34	Papua Barat	49	17	9	6	51
Total		6,037	1,121	464	189	6,505

Tabel 2.21 Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Anak

f. Jumlah Perkara Lalu Lintas

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara Lalulintas	Denda
1	Banda Aceh	24,062	1,888,494,000
2	Medan	52,559	3,691,865,000
3	Padang	50,343	4,760,913,000
4	Riau	49,721	4,726,383,000
5	Jambi	39,103	4,140,531,214
6	Palembang	65,146	7,565,357,203
7	Bengkulu	20,708	3,225,204,570
8	Tanjung Karang	29,046	2,219,470,900
9	Bangka Belitung	25,107	1,760,195,000
10	Jakarta	397,988	59,636,085,027
11	Bandung	196,878	16,971,398,165
12	Semarang	263,589	21,995,240,187
13	Yogyakarta	69,305	6,242,577,000
14	Surabaya	219,528	18,084,082,990
15	Banten	62,690	6,995,727,011
16	Denpasar	52,548	4,367,766,000
17	Mataram	41,047	4,604,705,296
18	Kupang	13,613	1,327,074,500
19	Pontianak	2,932	454,130,500
20	Palangkaraya	7,958	1,278,096,000
21	Banjarmasin	26,403	2,719,351,500
22	Samarinda	14,288	2,449,334,000
23	Manado	22,414	2,058,164,408
24	Palu	22,559	1,847,578,400
25	Makassar	43,452	6,318,632,900
26	Kendari	17,007	1,685,307,700
27	Gorontalo	9,148	694,990,400
28	Ambon	7,905	1,177,806,900
29	Maluku Utara	19,388	1,780,800,000
30	Jayapura	13,320	1,920,199,000
31	Kepulauan Riau	13,893	1,638,166,000
32	Kalimantan Utara	2,595	362,234,187
33	Sulawesi Barat	11,523	1,041,958,000
34	Papua Barat	3,437	328,429,000
Total		1,911,203	201,958,248,958

Tabel 2.22 Perkara Lalu Lintas

A.4 Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Perdata															
		Gugatan		Permohonan		Bantahan		Gugatan Sederhana		Kepailitan		PKPU		HKI		PHI	
		e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual
1	Banda Aceh	326	6	2,161	68	19	3	35	0	0	0	0	0	0	0	15	1
2	Medan	2,886	93	3,876	226	67	1	199	4	5	54	42	10	5	0	251	40
3	Padang	688	57	1,158	42	37	2	245	4	0	0	0	0	0	0	40	2
4	Riau	874	4	1,150	9	24	0	139	0	0	0	0	0	0	0	62	22
5	Jambi	495	8	466	39	8	0	244	0	0	0	0	0	0	0	16	6
6	Palembang	572	4	872	9	18	0	465	1	0	0	0	0	0	0	104	29
7	Bengkulu	144	13	397	45	4	0	62	6	0	0	0	0	0	0	6	0
8	Tanjung Karang	645	13	1,243	53	14	0	138	2	0	0	0	0	0	0	31	1
9	Bangka Belitung	213	1	352	0	4	0	58	0	0	0	0	0	0	0	16	0
10	Jakarta	4,797	12	5,579	7	104	0	138	0	47	122	401	21	98	25	346	26
11	Bandung	3,677	11	6,771	49	149	0	696	1	0	0	0	0	0	0	43	183
12	Semarang	3,102	12	6,442	118	118	0	1,770	1	13	55	42	2	6	0	87	6
13	Yogyakarta	617	10	2,951	55	14	0	118	1	0	0	0	0	0	0	53	0
14	Surabaya	4,345	18	11,065	42	162	1	1,179	7	28	121	116	3	13	0	119	14
15	Banten	1,642	13	2,346	13	51	1	198	0	0	0	0	0	0	0	105	14
16	Denpasar	3,868	21	2,324	22	59	0	56	0	0	0	0	0	0	0	13	6
17	Mataram	667	2	720	34	40	0	85	0	0	0	0	0	0	0	20	0
18	Kupang	909	9	1,856	11	12	2	106	2	0	0	0	0	0	0	17	2
19	Pontianak	789	0	2,377	0	20	0	50	0	0	0	0	0	0	0	42	3
20	Palangkaraya	625	0	580	0	15	1	58	0	0	0	0	0	0	0	27	0
21	Banjarmasin	700	2	1,267	13	1	0	97	3	0	0	0	0	0	0	21	5
22	Samarinda	1,026	6	1,139	13	27	0	71	1	0	0	0	0	0	0	38	6
23	Manado	2,311	64	2,169	44	35	1	298	4	0	0	0	0	0	0	19	1
24	Palu	569	61	201	49	8	0	91	21	0	0	0	0	0	0	9	0
25	Makassar	1,468	17	2,756	58	56	0	127	0	4	7	18	0	1	0	39	0
26	Kendari	332	0	451	1	4	0	33	0	0	0	0	0	0	0	22	1
27	Corontalo	206	3	192	1	7	0	39	0	0	0	0	0	0	0	19	0
28	Ambon	460	34	350	22	12	0	34	0	0	0	0	0	0	0	5	0
29	Maluku Utara	294	12	234	59	6	0	42	2	0	0	0	0	0	0	19	4
30	Jayapura	494	153	1,185	579	5	3	29	24	0	0	0	0	0	0	3	15
31	Kepulauan Riau	573	0	881	3	15	0	52	0	0	0	0	0	0	0	18	10
32	Kalimantan Utara	127	0	254	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	137	0	253	2	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	191	42	577	22	8	0	19	1	0	0	0	0	0	0	4	0
Total		40,769	701	66,595	1,709	1,131	15	6,981	85	97	359	619	36	123	25	1,629	397

Tabel 2.23 Statistik E-Court

B. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi

B.1 Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tinggi

- Sisa Perkara Tahun 2022	:	1,309	Perkara
- Perkara Masuk	:	8,349	Perkara
- Beban	:	9,658	Perkara
- Perkara Putus	:	8,316	Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2023	:	1,342	Perkara

Tabel 2.24 Perkara Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak 8.349 perkara dimana sisa perkara tahun 2022 sebanyak 1.309 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2023 sebanyak 9.658 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil diputus sebanyak 8.316 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 86 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 86 %, sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara sama dengan tahun sebelumnya.

B.2 Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tinggi

- Sisa Perkara Tahun 2022	:	1,800	Perkara
- Perkara Masuk	:	14,503	Perkara
- Beban	:	16,303	Perkara
- Perkara Putus	:	14,694	Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2023	:	1,609	Perkara

Tabel 2.25 Perkara Pidana Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara yang masuk tahun 2023 sebanyak 14.503 perkara dimana sisa perkara tahun 2022 sebanyak 1.800 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2023 sebanyak 16.303 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2023 berhasil diputus sebanyak 14.694 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 90 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 89 %, sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara menurun sebesar 1 %.

3. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan

A. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri

A.1 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

No	Pengadilan Tinggi	Gugatan		Permohonan		Gugatan Sederhana		Perlawanan/Bantahan	
		<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	≤25 Hari Kerja	>25 Hari Kerja	<5 Bulan	>5 Bulan
1	Banda Aceh	296	15	2,217	1	28	1	25	1
2	Medan	2,256	602	4,081	0	131	23	40	23
3	Padang	491	248	118	1	222	24	16	13
4	Riau	679	133	1,174	0	103	14	20	12
5	Jambi	384	62	515	0	241	6	5	1
6	Palembang	494	90	879	0	446	43	20	3
7	Bengkulu	110	41	436	0	58	3	3	5
8	Tanjung Karang	514	105	1,285	0	130	1	13	4
9	Bangka Belitung	199	10	356	0	60	1	3	2
10	Jakarta	3,064	1681	5,575	10	100	27	47	52
11	Bandung	2,613	927	6,807	1	598	54	67	57
12	Semarang	2,718	270	6,491	8	1,599	37	104	13
13	Yogyakarta	466	109	2,929	0	107	5	13	3
14	Surabaya	3,481	693	11,022	2	1,040	39	111	56
15	Banten	1,161	405	2,346	0	141	31	25	17
16	Denpasar	3,411	278	2,300	0	46	7	29	24
17	Mataram	554	121	758	0	79	4	24	6
18	Kupang	672	179	1,847	0	82	9	6	7
19	Pontianak	704	66	2,372	1	40	0	13	3
20	Palangkaraya	526	83	577	0	49	5	9	3
21	Banjarmasin	659	38	1,277	0	86	3	1	0
22	Samarinda	775	189	1,153	0	54	6	14	6
23	Manado	2,023	232	2,191	0	239	47	22	9
24	Palu	500	104	256	0	89	3	7	6
25	Makassar	1,232	254	2,778	0	114	14	47	29
26	Kendari	284	59	453	0	28	2	7	0
27	Gorontalo	139	38	191	0	26	6	4	0
28	Ambon	415	71	374	0	28	1	3	4
29	Maluku Utara	252	23	294	0	37	2	6	0
30	Jayapura	497	94	1,761	0	50	10	2	2
31	Kepulauan Riau	513	53	873	0	48	7	11	3
32	Kalimantan Utara	123	6	262	0	3	0	0	1
33	Sulawesi Barat	118	10	256	0	7	0	4	1
34	Papua Barat	186	29	595	0	15	4	6	0

Tabel 2.26 Rerata Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri

A.2 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus

No	Pengadilan Tinggi	Kepailitan		Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)		Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	
		≤ 60 Hari Kerja	>60 Hari Kerja	≤ 5 Bulan	>5 Bulan	≤ 5 Bulan	>5 Bulan	≤ 50 Hari Kerja	> 50 Hari Kerja
1	Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	10	0
2	Medan	49	2	39	13	4	0	114	190
3	Padang	0	0	0	0	0	0	13	27
4	Riau	0	0	0	0	0	0	37	40
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	9	17
6	Palembang	0	0	0	0	0	0	40	95
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	6	1
8	Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	3	31
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	13	4
10	Jakarta	71	116	362	60	105	26	60	343
11	Bandung	0	0	0	0	0	0	82	121
12	Semarang	63	1	36	6	3	0	34	56
13	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	13	28
14	Surabaya	62	56	108	12	15	0	74	83
15	Banten	0	0	0	0	0	0	28	86
16	Denpasar	0	0	0	0	0	0	7	12
17	Mataram	0	0	0	0	0	0	16	6
18	Kupang	0	0	0	0	0	0	9	12
19	Pontianak	0	0	0	0	0	0	17	30
20	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	3	19
21	Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	7	20
22	Samarinda	0	0	0	0	0	0	18	37
23	Manado	0	0	0	0	0	0	11	11
24	Palu	0	0	0	0	0	0	9	1
25	Makassar	5	4	20	0	1	0	32	21
26	Kendari	0	0	0	0	0	0	23	1
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	5	15
28	Ambon	0	0	0	0	0	0	4	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	4	0
30	Jayapura	0	0	0	0	0	0	19	1
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	13	18
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	4
Total		250	179	565	91	128	26	733	1,330

Tabel 2.27 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus

A.3 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

a. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

No	Pengadilan Tinggi	Pidana		Pidana Biasa		Pidana Singkat		Pidana Cepat	
		<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan
1	Banda Aceh	3,658	0	3,183	0	0	0	475	0
2	Medan	12,914	14	11,477	14	1	0	1,436	0
3	Padang	3,548	5	3,239	5	1	0	308	0
4	Riau	7,262	8	6,358	8	0	0	904	0
5	Jambi	2,821	3	2,569	3	4	0	248	0
6	Palembang	6,228	2	5,981	2	0	0	247	0
7	Bengkulu	1,584	0	1,499	0	2	0	83	0
8	Tanjung Karang	4,307	2	4,223	2	1	0	83	0
9	Bangka Belitung	1,395	0	1,379	0	0	0	16	0
10	Jakarta	6,150	39	4,983	39	8	0	1,159	0
11	Bandung	10,248	24	9,362	24	6	0	880	0
12	Semarang	7,681	3	7,166	3	2	0	513	0
13	Yogyakarta	2,210	1	1,903	1	12	0	295	0
14	Surabaya	18,404	11	13,526	11	1	0	4,877	0
15	Banten	3,821	2	3,685	2	0	0	136	0
16	Denpasar	1,957	3	1,893	3	3	0	61	0
17	Mataram	2,136	1	1,986	1	4	0	146	0
18	Kupang	1,380	2	1,360	2	0	0	20	0
19	Pontianak	3,564	1	3,337	1	3	0	224	0
20	Palangkaraya	2,419	2	2,314	2	0	0	105	0
21	Banjarmasin	4,265	0	3,804	0	2	0	459	0
22	Samarinda	4,132	8	3,904	8	1	0	227	0
23	Manado	1,649	21	1,569	21	1	0	79	0
24	Palu	1,793	10	1,774	10	0	0	19	0
25	Makassar	5,407	11	5,266	11	0	0	141	0
26	Kendari	1,727	4	1,695	4	0	0	32	0
27	Gorontalo	1,651	2	626	4	0	0	29	0
28	Ambon	1,149	0	803	4	3	0	69	0
29	Maluku Utara	768	0	629	0	0	0	77	0
30	Jayapura	632	1	1,297	3	0	0	190	0
31	Kepulauan Riau	130,583	191	1,602	2	1	0	48	0
32	Kalimantan Utara	0	0	1,117	0	0	0	32	0
33	Sulawesi Barat	0	0	753	0	1	0	14	0
34	Papua Barat	0	0	601	1	0	0	31	0
Total		257,443	371	116,863	191	57	0	13,663	0

Tabel 2.28 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

b. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

No	Pengadilan Tinggi	Pidana Anak		Tindak Pidana korupsi (Tipikor)		Perikanan		Pidana Praperadilan	
		<5 Bulan	>5 Bulan	<=120 Hari	>120 Hari	<=30 Hari	>30 Hari	<5 Bulan	>5 Bulan
1	Banda Aceh	60	0	37	25	0	0	22	0
2	Medan	476	1	43	79	6	1	187	0
3	Padang	172	0	3	27	0	0	29	0
4	Riau	209	1	19	43	0	0	67	0
5	Jambi	122	0	16	18	0	0	36	0
6	Palembang	307	0	46	21	0	0	97	0
7	Bengkulu	169	2	25	13	0	0	19	0
8	Tanjung Karang	284	2	25	12	0	0	15	0
9	Bangka Belitung	78	0	23	17	0	0	7	0
10	Jakarta	126	0	19	70	0	0	189	0
11	Bandung	398	0	40	68	0	0	85	0
12	Semarang	331	0	40	35	0	0	55	0
13	Yogyakarta	137	1	1	10	0	0	15	0
14	Surabaya	404	0	63	59	0	0	98	0
15	Banten	175	0	3	27	0	0	42	0
16	Denpasar	40	0	12	17	0	0	30	0
17	Mataram	138	0	6	23	3	0	28	0
18	Kupang	76	0	36	26	0	0	33	0
19	Pontianak	112	0	28	26	8	0	16	0
20	Palangkaraya	60	0	8	18	0	0	18	0
21	Banjarmasin	113	0	16	20	0	0	11	0
22	Samarinda	121	0	29	26	0	0	22	0
23	Manado	106	1	12	12	11	0	31	0
24	Palu	50	0	18	17	0	0	24	0
25	Makassar	275	0	39	85	0	0	63	0
26	Kendari	148	0	27	10	0	0	31	0
27	Gorontalo	24	1	8	23	0	0	17	0
28	Ambon	46	0	16	32	0	0	24	0
29	Maluku Utara	29	0	7	11	1	0	13	0
30	Jayapura	103	0	11	11	0	0	12	0
31	Kepulauan Riau	107	0	8	14	10	0	37	0
32	Kalimantan Utara	53	0	0	0	0	0	7	0
33	Sulawesi Barat	43	0	10	7	0	0	4	0
34	Papua Barat	47	0	4	25	0	0	14	0
Total		5.139	9	698	927	39	1	1.398	0

Tabel 2.29 Rerata Waktu Perkara Pidana Khusus

B. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi

B.1 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

No	Pengadilan Tinggi	Gugatan		Perlawanan/Bantahan	
		<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan
1	Banda Aceh	130	0	13	0
2	Medan	723	0	19	0
3	Padang	302	0	10	0
4	Riau	194	1	23	0
5	Jambi	144	0	1	0
6	Palembang	177	0	6	0
7	Bengkulu	40	0	4	0
8	Tanjung Karang	118	0	4	0
9	Bangka Belitung	22	0	1	0
10	Jakarta	1,402	2	47	0
11	Bandung	807	0	52	0
12	Semarang	543	0	42	0
13	Yogyakarta	109	0	5	0
14	Surabaya	873	3	68	0
15	Banten	333	0	12	0
16	Denpasar	288	1	20	0
17	Mataram	227	0	12	0
18	Kupang	173	1	5	0
19	Pontianak	113	0	5	0
20	Palangkaraya	106	0	4	0
21	Banjarmasin	85	0	0	0
22	Samarinda	225	0	11	0
23	Manado	191	0	11	0
24	Palu	122	0	5	0
25	Makassar	476	2	43	0
26	Kendari	137	0	7	0
27	Gorontalo	49	0	2	0
28	Ambon	78	0	0	0
29	Maluku Utara	56	0	1	0
30	Jayapura	78	0	4	0
31	Kepulauan Riau	87	0	7	0
32	Kalimantan Utara	26	0	1	0
33	Sulawesi Barat	32	0	4	0
34	Papua Barat	36	0	0	0
Total		8,502	10	449	0

Tabel 2.30 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Tinggi

B.2 Rerata Waktu penyelesaian Perkara Pidana

No	Pengadilan Tinggi	Pidana Biasa		Pidana Singkat		Pidana Cepat	
		<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan
1	Banda Aceh	580	0	0	0	0	0
2	Medan	1,944	0	1	0	9	0
3	Padang	673	0	0	0	2	0
4	Riau	756	0	0	0	2	0
5	Jambi	328	0	0	0	0	0
6	Palembang	392	0	0	0	1	0
7	Bengkulu	216	2	0	0	0	0
8	Tanjung Karang	359	0	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	195	0	0	0	0	0
10	Jakarta	354	0	0	0	0	0
11	Bandung	536	0	0	0	10	0
12	Semarang	990	0	0	0	1	0
13	Yogyakarta	128	0	0	0	1	0
14	Surabaya	1,723	0	0	0	2	0
15	Banten	208	0	0	0	1	0
16	Denpasar	127	0	0	0	0	0
17	Mataram	265	0	0	0	4	0
18	Kupang	198	0	0	0	0	0
19	Pontianak	432	0	0	0	2	0
20	Palangkaraya	260	0	0	0	0	0
21	Banjarmasin	552	0	0	0	0	0
22	Samarinda	247	0	0	0	0	0
23	Manado	142	0	0	0	2	0
24	Palu	193	0	0	0	0	0
25	Makassar	1,328	0	0	0	2	0
26	Kendari	223	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	124	0	0	0	0	0
28	Ambon	261	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	143	0	0	0	0	0
30	Jayapura	126	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	216	0	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	70	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	318	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	85	0	0	0	0	0
Total		14,692	2	1	0	39	0

Tabel 2.31 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Tinggi

B.3 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

No	Pengadilan Tinggi	Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)		Perikanan		Anak	
		<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan
1	Banda Aceh	39	0	0	0	5	0
2	Medan	40	0	1	0	65	0
3	Padang	18	0	0	0	12	0
4	Riau	30	0	0	0	24	0
5	Jambi	9	0	0	0	13	0
6	Palembang	23	0	0	0	23	0
7	Bengkulu	7	0	0	0	10	0
8	Tanjung Karang	19	0	0	0	24	0
9	Bangka Belitung	21	0	0	0	7	0
10	Jakarta	56	0	0	0	7	0
11	Bandung	65	0	0	0	23	0
12	Semarang	33	0	0	0	22	0
13	Yogyakarta	11	0	0	0	8	0
14	Surabaya	71	0	0	0	38	0
15	Banten	43	0	0	0	15	0
16	Denpasar	26	0	0	0	2	0
17	Mataram	13	0	0	0	17	0
18	Kupang	24	0	0	0	9	0
19	Pontianak	16	0	1	0	8	0
20	Palangkaraya	11	0	0	0	8	0
21	Banjarmasin	12	0	0	0	12	0
22	Samarinda	23	0	0	0	5	0
23	Manado	24	0	2	0	15	0
24	Palu	45	0	0	0	4	0
25	Makassar	69	0	0	0	50	0
26	Kendari	7	0	0	0	16	0
27	Gorontalo	25	0	0	0	5	0
28	Ambon	23	0	0	0	5	0
29	Maluku Utara	16	0	0	0	3	0
30	Jayapura	4	0	0	0	8	0
31	Kepulauan Riau	18	0	0	0	4	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	7	0
33	Sulawesi Barat	10	0	0	0	6	0
34	Papua Barat	18	0	0	0	1	0
Total		869	0	4	0	481	0

Tabel 2.32 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi

4. Capaian Prioritas Nasional

A. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum yang membutuhkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemanfaatan posbakum di pengadilan pengadilan setiap tahun ada peningkatan dan penurunan jumlah layanan. Berikut rincian rekap bulanan laporan posbakum di pengadilan:

NO	Bulan	Jenis Layanan		
		Informasi/Konsultasi /Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Info Organisasi bantuan Hukum
1	Januari	1,873	1,160	701
2	Februari	2,759	1,290	803
3	Maret	2,760	1,385	880
4	April	1,712	767	562
5	Mei	2,086	990	802
6	Juni	2,015	918	800
7	Juli	1,989	987	807
8	Agustus	2,779	989	808
9	September	3,524	943	590
10	Oktober	2,722	930	583
11	November	2,622	998	526
12	Desember	2,699	975	370
Jumlah		29,540	12,332	8,232
Total		50,104		

Tabel 2.33 Posbakum

Jenis layanan pada Posbakum tahun 2023 berjumlah 50.104 perkara, Alokasi anggaran Posbakum untuk 416 satuan kerja pengadilan sebesar Rp. 11.173.200.000,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) realisasi sebesar 11.124.719.633,- (sebelas milyar

seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga).

B. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung pengadilan merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dengan pertimbangan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dengan kriteria sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;
2. Apabila fasilitas gedung sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*) tidak layak dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan di tempat tersebut, maka ketua Pengadilan diminta dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau instansi lain untuk menyediakan tempat/ruangan yang layak untuk sidang.
3. Sidang di luar gedung Pengadilan yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat menggunakan atribut persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan baik yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat. Pengawasan melekat yang dimaksud meliputi pencatatanya pada SIPP, penggunaan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan serta laporan pelaksanaan melalui pelaporan elektronik;
5. Apabila diperlukan, dalam pelaksanaannya sidang diluar gedung Pengadilan dapat sertakan dengan pelayanan posbakum dan mediasi;
6. Ketua Pengadilan Tinggi melalui hakim pengawas daerah yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan per tri wulan.

Berikut adalah data Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023:

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara
1	Banda Aceh	20
2	Medan	1,501
3	Padang	243
4	Riau	190
5	Jambi	0
6	Palembang	247
7	Bengkulu	34
8	Tanjung Karang	0
9	Bangka Belitung	0
10	Jakarta	0
11	Bandung	209
12	Semarang	156
13	Yogyakarta	0
14	Surabaya	0
15	Banten	0
16	Denpasar	2
17	Mataram	119
18	Kupang	6
19	Pontianak	156
20	Palangkaraya	83
21	Banjarmasin	0
22	Samarinda	0
23	Manado	74
24	Palu	155
25	Makassar	68
26	Kendari	220
27	Gorontalo	26
28	Ambon	36
29	Maluku Utara	184
30	Jayapura	49
31	Kepulauan Riau	9
32	Kalimantan Utara	0
33	Sulawesi Barat	23
34	Papua Barat	22
Total		3,832

Tabel 2.34 Sidang Diluar Gedung

Jumlah sidang diluar gedung pada Pengadilan Tahun 2023 sebanyak 3.832 data. Untuk Pengadilan yang melakukan sidang diluar gedung sebanyak 67 Pengadilan Negeri dengan Realisasi 5.796.518.358,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

C. Pembebasan Biaya Perkara

Perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara biasa di peruntukan bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berpekara secara Cuma-Cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014. Berikut data pembebasan perkara.

No	Bulan	Jenis		Pemohon			Jenis Perkara					
		DIPA	Murni	Laki-Laki	Perempuan	Badan Hukum	Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Kepailitan	PHI	Perdata Perlawanan	Perdata Permohonan
1	Januari	1,342	78	1,081	396	117	8	0	0	1,405	0	7
2	Februari	112	96	188	103	13	13	0	0	187	0	8
3	Maret	118	99	134	83	23	15	0	0	187	0	15
4	April	40	25	50	32	6	3	0	0	61	0	1
5	Mei	84	28	82	41	13	18	0	0	86	0	7
6	Juni	70	15	67	36	0	14	0	0	54	0	17
7	Juli	76	48	82	35	12	8	0	0	98	0	18
8	Agustus	112	38	99	118	4	13	1	0	96	0	40
9	September	81	43	88	50	8	13	0	0	81	0	30
10	Oktober	128	37	124	79	8	24	1	0	103	0	37
11	November	121	35	104	73	7	29	1	0	94	0	32
12	Desember	97	44	92	64	4	16	1	0	73	0	51
Jumlah		2,381	586	2,191	1,110	215	174	4	0	2,525	0	263
Total		2,967		3,516			2,966					

Tabel 2.35 Pembebasan Biaya Perkara

Jumlah pengadilan pemberi layanan tahun 2023 untuk Jenis sebanyak 2.967 Perkara, pemohon sebanyak 3.516 Orang dan untuk jenis perkara sebanyak 2.966. Untuk Pengadilan yang memberi Layanan Sebanyak 88 Pengadilan Negeri dengan Realisasi sebanyak 61.947.500,- (Enama Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah).

D. Restoratif Justice

Keadaan restorative (*restorative justice*) adalah salah satu penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemilahan dan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku. Korban dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan Restorative Justice sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan seperti peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Penyelesaian perkara yang bisa melalui keadilan restorative (*restorative justice*) seperti tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Berikut data *Restorative Justice* :

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara
1	Banda Aceh	41
2	Medan	531
3	Padang	10
4	Riau	28
5	Jambi	80
6	Palembang	5
7	Bengkulu	10
8	Tanjung Karang	29
9	Bangka Belitung	2
10	Jakarta	65
11	Bandung	10
12	Semarang	73
13	Yogyakarta	4
14	Surabaya	80
15	Banten	10
16	Denpasar	112
17	Mataram	32
18	Kupang	5
19	Pontianak	3
20	Palangkaraya	1
21	Banjarmasin	38
22	Samarinda	5
23	Manado	6
24	Palu	53
25	Makassar	33
26	Kendari	16
27	Gorontalo	2
28	Ambon	2
29	Maluku Utara	0
30	Jayapura	5
31	Kepulauan Riau	1
32	Kalimantan Utara	3
33	Sulawesi Barat	6
34	Papua Barat	2
Total		1,303

Tabel 2.36 Restorative Justice

5. Penghargaan Pengadilan

A. Penghargaan Pelaksanaan e-Litigasi

Penilaian pelaksanaan e-Litigasi meliputi :

1. Sosialisasi e-Litigasi kepada para pihak internal dan eksternal;
2. Monitoring dan evaluasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya hukum dan Persidangan Kasasi, dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
3. Jumlah putusan yang dikeluarkan secara elektronik

Penghargaan diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Tulung Agung	Kategori lebih dari 1000 perkara
2.	II.	Sleman	
3.	III.	Pontianak	
4.	IV.	Malang	
5.	V.	Tondano	
6.	VI.	Batam	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Wates	Jumlah Perkara 501 s/d 1000
2.	II.	Singkawang	
3.	III.	Kab. Kediri	
4.	IV.	Pekalong	
5.	V.	Bangil	
6.	VI.	Tabanan	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Sambas	Jumlah Perkara 101 s/d 500
2.	II.	Lhokseumawe	
3.	III.	Lhoksukon	
4.	IV.	Pamekasan	
5.	V.	Banyumas	
6.	VI.	Jantho	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Kaimana	Jumlah Perkara 26 s/d 100
2.	II.	Biak	
3.	III.	Sanana	
4.	IV.	Kepahiang	
5.	V.	Paringin	
6.	VI.	Sabang	
7.	VII.	Prabumulih	

Tabel 2.37 Penghargaan E-litigasi

B. Penghargaan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Penilaian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum meliputi :

1. Inovasi yang dilaksanakan Posbakum
2. Publikasi dan sosialisasi

3. Proses seleksi Organisasi Bantuan Hukum pada Posbakum
4. Pembinaan Posbakum oleh Panitera Muda Hukum
5. Laporan dan Monitoring Evaluasi
6. Pemahaman petugas Posbakum dan aparat pengadilan terkait (Ketua, Panitera, Panitera Muda)

Penghargaan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum tahun 2023 diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Jember
2.	II.	Kepahiang
3.	III.	Gresik
4.	IV.	Cikarang
5.	V.	Mataram
6.	VI.	Pangkalan Bun

Tabel 2.38 Pemenang Lomba Posbakum

C. Penghargaan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Penilaian pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan meliputi :

1. Inovasi yang dilaksanakan Posbakum
2. Publikasi dan sosialisasi
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
4. Perencanaan pelaksanaan dan penganggaran

Penghargaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan tahun 2023 diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Subang
2.	II.	Kepahiang
3.	III.	Mataram

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
4.	IV.	Unaaha
5.	V.	Tanjung Pati
6.	VI.	Poso

Tabel 2.39 Pemenang Lomba Sidang Diluar Gedung

D. Penghargaan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

Penilaian pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara meliputi :

1. Inovasi yang dilaksanakan Posbakum
2. Publikasi dan sosialisasi
3. Perencanaan dan penganggaran
4. Pemahaman pelaksanaan pembebasan biaya perkara
5. Monitoring dan evaluasi

Penghargaan pelaksanaan pembebasan biaya perkara tahun 2023 diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Kepahiang
2.	II.	Jember
3.	III.	Makasar
4.	IV.	Sibuhuan
5.	V.	Cikarang
6.	VI.	Bandung

Tabel 2.40 Pemenang Lomba Prodeo

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial

- Jumlah Hakim

a. Data Hakim Seluruh Indonesia

- Data Hakim per Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Ketua Pengadilan Tinggi	31	3
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	21	5
3	Hakim Pengadilan Tinggi	526	128
4	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I	21	17
5	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I/Balitbang Diklat Kumdil	8	3
6	Hakim Tinggi Yustisial Bawas M.A.R.I	26	5
7	Hakim Tinggi Yustisial pada Pengadilan Tinggi	16	8
8	Hakim Tinggi Non Palu pada Pengadilan Tinggi	0	0
9	Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus	12	3
10	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus	13	2
11	Hakim Pengadilan Negeri Klas I A khusus	319	98
12	Ketua Pengadilan Negeri Klas I A	45	8
13	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A	44	6
14	Hakim Pengadilan Negeri Klas I A	350	230
15	Ketua Pengadilan Negeri Klas I B	82	28
16	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB	73	26
17	Hakim Pengadilan Negeri Klas I B	398	224
18	Ketua Pengadilan Negeri Klas II	139	51
19	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II	96	53
20	Hakim Pengadilan Negeri Klas II	691	320
21	Hakim Yustisial M.A.R.I	90	53
22	Hakim Yustisial M.A.R.I/ Diklat Kumdil	3	5
23	Hakim Yustisial pada Sektim Bawas	18	4
24	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi	18	7
25	Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi	14	3
Total		3,054	1,290

Tabel 3.1 Hakim Pergender

– Kenaikan Pangkat Hakim

		April		Oktober	
-	KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis)	488	Orang	29	Orang
-	Kenaikan Pangkat Struktural	130	Orang	14	Orang
-	Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	75	Orang	11	Orang
Total		693	Orang	54	Orang

Tabel 3.2 Kenaikan Pangkat Hakim

– Hakim Karir

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi	160
2	Hakim Tipikor Pengadilan Negeri	120
3	Hakim Lingkungan Pengadilan Tinggi	133
4	Hakim Lingkungan Pengadilan Negeri	770
5	Hakim Niaga	35
6	Hakim PHI	86
7	Hakim Perikanan	18
8	Hakim Anak Pengadilan Tinggi	270
9	Hakim Anak Pengadilan Negeri	1,808
10	Hakim Pemilu Pengadilan Tinggi	484
11	Hakim Pemilu Pengadilan Negeri	3,016
12	Hakim HAM Pengadilan Tinggi	0
13	Hakim HAM Pengadilan Negeri	0
Total		6,900

Tabel 3.3 Hakim Karir

– Hakim Ad Hoc

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi	102
2	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri	164
3	Hakim Ad Hoc PHI	110
4	Hakim Ad Hoc Perikanan	41
5	Hakim Ad Hoc HAM Pengadilan Tinggi	0
6	Hakim Ad Hoc Ham Pengadilan Negeri	0
Total		417

Tabel 3.4 Hakim Ad Hoc

b. Promosi dan Mutasi Hakim

– Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri

-	Ketua Pengadilan Negeri	138	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	161	Orang
-	Penempatan Cakim	0	Orang
-	Hakim Pengadilan Negeri	392	Orang
-	Hakim Yustisial MA RI/Asisten Hakim Agung/Biro Humas	8	Orang
-	Hakim Yustisial MA/Bawas	0	Orang
-	Hakim Yustisial MA/ Diklat	0	Orang
-	Hakim Yustisial MA/Badilum	0	Orang
-	Hakim Yustisial PT	3	Orang
-	Hakim Non Palu (Hukdis)	7	Orang
Total		709	Orang

Tabel 3.5 Promosi dan Mutasi Hakim PN

– Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi

-	Ketua Pengadilan Tinggi	21	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	29	Orang
-	Hakim Pengadilan Tinggi	186	Orang
-	Hakim Yustisial MA	1	Orang
-	Hakim Yustisial MA/DIP Bawas	2	Orang
-	Hakim Tinggi Yustisial PT	1	Orang
-	Hakim Yustisial MA/Diklat	0	Orang
Total		240	Orang

Tabel 3.6 Promosi dan Mutasi Hakim PT

– Mutasi dan penempatan Hakim Ad Hoc

-	Penempatan Tipikor Hakim Pengadilan Tinggi	16	Orang
-	Penempatan Tipikor Hakim Pengadilan Negeri	72	Orang
-	Penempatan Hakim Ad Hoc Perikanan	0	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Banding	0	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Pertama	0	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri	2	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc Perikanan	0	Orang
Total		90	Orang

Tabel 3.7 Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc

c. Hukuman Disiplin Hakim

		Berat	Sedang	Ringan	Jumlah
-	Hakim Pengadilan Negeri	3	11	69	83
-	Hakim Pengadilan Tinggi	7	1	8	16
-	Hakim Ad Hoc Tipikor PN	0	0	0	0
-	Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri	0	0	0	0
Total		10	12	77	99

Tabel 3.8 Hukdis Hakim

d. Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim

		Pensiun	Diberhentikan	Diberhentikan Sementara	Mengundurkan Diri	Meninggal
-	Hakim Pengadilan Negeri	29	1	2	1	16
-	Hakim Pengadilan Tinggi	60	0	0	0	17
-	Hakim Ad Hoc	0	0	0	0	0
Total		89	1	2	1	33

Tabel 3.9 Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim

e. Diklat Hakim

e.1. Diklat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Diklat dan peserta dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, berikut rincian dari kegiatan diklat seperti:

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Bimtek RJ	315 Orang
2.	Bimtek PBH	201 Orang
3.	Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua (Bimtek Pemilu)	33 Orang
4.	Diseminasi Penegak Hukum	26 Orang
5.	FGD Kepaniteraan (Jurusita)	36 Orang
6.	Bimtek HKI/Niaga	28 Orang

Tabel 3.10 Diklat Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

e.2. Diklat yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Direktorat Jenderal Badilum hanya memberikan nama-nama peserta mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis kepada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, berikut rincian diklat atau Bimbingan Teknis yang dilakukan seperti:

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Diklat Mediator	80 orang
2.	Diklat SPPA	246 Orang
3.	Diklat PHI	60 Orang
4.	Diklat HKI	162 Orang
5.	Penyelenggara KY	199 Orang
6.	Diklat Panitera	40 Orang

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
7.	Diklat Jurusita	120 Orang
8.	FGD Terorisme	19 Orang
9.	Diklat Narkotika	10 Orang
10.	Diklat Gugatan Sederhana	80 Orang
11.	Lokakarya di Thailand	2 Orang
12.	Diklat Perikanan	80 Orang
13.	Diklat Bukti Elektronik	80 Orang
14.	Diklat Akses Perempuan Terhadap Keadilan	40 Orang
15.	FGD Kepailitan/PKPU dan HKI	128 Orang
16.	Pelatihan Singkat HKI	90 Orang
17.	Tindak Pidana Terorisme	40 orang

Tabel 3.11 Diklat Hakim Oleh Litbang

- **Panitera**

f. Data Kepaniteraan Seluruh Indonesia

– Data Kepaniteraan per Gender

No	Jabatan	PT		PNIA K		PNIA		PNIB		PNII		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Panitera	26	7	14	1	44	9	98	15	167	29	410
2	Panitera Muda Pidana	25	9	10	4	38	14	86	24	123	50	383
3	Panitera Muda Perdata	26	4	12	3	28	24	87	23	121	51	379
4	Panitera Muda Hukum	24	8	10	5	36	14	74	33	112	66	382
5	Panitera muda Tipikor	20	11	6	1	17	6	1	0	0	0	62
6	Panitera Muda PHI	0	0	3	3	12	14	0	1	0	0	33
7	Panitera Muda Perikanan	0	0	1	1	1	2	1	1	0	1	8
8	Panitera Muda Niaga	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5
9	Panitera Pengganti	321	227	232	253	271	381	303	311	284	222	2.805
10	Jurusita	0	0	75	15	154	51	219	48	231	42	835
11	Jurusita Pengganti	0	0	112	104	129	105	166	63	130	42	851
Total		442	266	477	393	730	620	1.035	519	1.168	503	6.153

Tabel 3.12 Data Kepniteraan Pergender

– Kenaikan Pangkat Panitera

		April		Oktober	
-	KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis)	0	Orang	0	Orang
-	Kenaikan Pangkat Struktural	142	Orang	95	Orang
-	Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	418	Orang	153	Orang
Total		560	Orang	248	Orang

Tabel 3.13 Kenaikan Pangkat Panitera

g. Promosi dan Mutasi Panitera

No	Jabatan	Jumlah Mutasi PT		Jumlah Mutasi PN	
1	Panitera	23	Orang	198	Orang
2	Panitera Muda	39	Orang	570	Orang
3	Mutasi Panitera Pengganti	14	Orang	225	Orang
4	Pengangkatan Panitera Pengganti	90	Orang	161	Orang
5	Mutasi Jurusita	0	Orang	23	Orang
6	Pengangkatan Jurusita	0	Orang	71	Orang
7	Lepas Jabatan Pandmud	0	Orang	1	Orang
8	Lepas Jabatan PP	0	Orang	0	Orang
9	Lepas Jabatan JS	0	Orang	2	Orang
Total		166	Orang	1,251	Orang

Tabel 3.14 Promosi dan Mutasi Panitera

h. Hukuman Disiplin Panitera

No	Jabatan	Jumlah Hukdis Ringan	Jumlah Hukdis Sedang	Jumlah Hukdis Berat	Jumlah
1	Panitera	4	4	2	10
2	Panitera Muda Hukum	3	2	0	5
3	Panitera Muda Niaga	0	0	0	0
4	Panitera Muda Perdata	6	1	0	7
5	Panitera Perikanan	0	0	0	0
6	Panitera PHI	0	1	0	1
7	Panitera Muda Pidana	4	1	0	5
8	Panitera Muda Tipikor	1	0	0	1
9	Panitera Pengganti	20	6	3	29
10	Jurusita	5	3	6	14
11	Jurusita Pengganti	0	0	4	4
Total		43	18	15	76

Tabel 3.15 Hukdis Panitera

i. Pensiun dan Meninggal Panitera

No	Jabatan	Jumlah			
		Pensiun		Meninggal	
		PT	PN	PT	PN
1	Panitera	8	4	1	5
2	Panitera Muda Hukum	4	11	0	1
3	Panitera Muda Niaga	0	0	0	0
4	Panitera Muda Perdata	7	16	0	0
5	Panitera Perikanan	0	0	0	0
6	Panitera PHI	0	1	0	0
7	Panitera Muda Pidana	5	11	0	1
8	Panitera Muda Tipikor	4	1	1	0
9	Panitera Pengganti	73	180	3	18
10	Jurusita	0	48	0	8
11	Jurusita Pengganti	0	55	0	6
Total		101	327	5	39

Tabel 3.16 Pensiun dan Meninggal

2. Sumber Daya Manusia Non Yustisial

A. Data Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 119 (seratus sembilan belas) dengan sebaran jabatan sebagai berikut: Dipimpin oleh eselon I yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 3 eselon II, terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 1 orang; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 1 orang; Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 1 orang, 11 orang eselon III, 33 orang eselon IV, 30 orang fungsional, 3 orang Hakim Yustisial, 39 orang Pelaksana serta 0 CPNS.

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023

No	Unit	Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Fungsional PPPK	Hakim Yustisial	Pelaksana	CPNS	Jumlah	Keterangan
1	Pimpinan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Sekretariat	-	-	4	11	12	3	11	-	41	
3	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	-	-	4	13	15	-	15	-	47	
4	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	-	1	3	9	3	-	13	-	29	
Jumlah		1	1	11	33	30	3	39	0	118	118+1 Penugasan PN Sampit

Tabel 3.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural

- Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang		Jumlah	Total
1	Golongan	IX	3	3
2	Golongan II	II/a	0	7
		II/b	0	
		III/c	5	
		III/d	2	
3	Golongan III	III/a	19	89
		III/b	24	
		III/c	18	
		III/d	28	
4	Golongan IV	IV/a	11	20
		IV/b	7	
		IV/c	1	
		IV/d	1	
Jumlah				119

Tabel 3.18 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Golongan	Ruangan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Pendidikan										Keterangan
					S3		S2		S1		D3		SLTA		
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV	E	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	C	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	B	5	2	7	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	
	A	6	5	11	-	-	4	5	2	-	-	-	-	-	
III	D	18	10	28	1	-	4	2	13	8	-	-	-	-	
	C	8	10	18	-	-	2	4	5	6	-	-	1	-	
	B	9	15	24	-	-	1	1	8	9	-	1	-	-	
	A	10	9	19	-	-	-	-	10	7	-	1	-	4	
II	D	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
	C	2	3	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	
	B	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX/PPPK	-	2	1	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
Jumlah		63	56	119	1	0	16	15	0	31	3	5	2	5	119 (1 Orang Penugasan PN Sampit)
Jumlah					78										

Tabel 3.19 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin

B. Pelatihan, Diklat dan Asessment

Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Tahun 2023 sebanyak 4 orang, diklat PKP atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berjumlah 2 orang dan PKA atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator berjumlah 2 orang.

C. Rekrutmen, Latsar dan Piagam

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tidak melaksanakan rekrutmen bagi tenaga teknis maupun non teknis namun melakukan rekrutmen untuk tenaga pramubakti untuk tahun 2023 tidak ada pengangkatan. Sedangkan penerima penghargaan Piagam dan Satya Lencana dengan jenis penghargaan XXX sebanyak 18 orang, XX sebanyak 3 sedangkan dengan jenis Dwi Windu sebanyak 0 Orang

D. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar

Jenis	Pensiun	Meninggal	Pindah/Keluar
Data	5	0	3
Jumlah	8		

Tabel 3.20 Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar

E. Kenaikan Pangkat

		Bulan	
		April	Oktober
-	KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis)	5	3
-	Kenaikan Pangkat Struktural	7	2
-	Fungsional	2	3
Jumlah		14	8

Tabel 3.21 Kenaikan Pangkat

3. Bimbingan Teknis Peradilan Umum

Pembinaan tenaga teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan masyarakat, pembinaan kepada aparat penegak hukum mengenai keadilan berbasis *restorative* (*restorative justice*), perempuan berhadapan dengan hukum dan tindak pidana pemilihan umum dengan cara mengevaluasi dengan menghadirkan **Supranawan Yusuf, S.H., M.P.A** asesor Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan **Drs. Susana Magdalena** Psikolog PPSDM.



Gambar 3. 1 Bimtek

Daftar kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut:

- a. Kegiatan Bimtek Yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Pelatihan	Tanggal	Orang
1.	Bimbingan Teknis	25 s.d 27 Januari 2023	40
	Penanganan Perkara	19 s.d 21 Februari 2023	89
	Berbasis Keadilan	19 s.d 21 Juni 2023	52
	Restoratif	23 s.d 25 Agustus 2023	70
		6 s.d 8 November 2023	64
2.	Bimtek Teknis Perempuan Berbadan dengan Hukum	11 April 2023	85
		22 s.d 24 Mei 2023	80
		9 s.d 11 Oktober 2023	36
3.	Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Bimbingan Teknis Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Wilayah Hukum PT Surabaya	11 s.d 13 Desember 2023	33
4.	Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan	7 s.d 9 Maret 2024	30
5.	FGD Kepaniteraan (Jurusita)	6 s.d 8 Juni 2023	40
6.	Bimtek Penyelesaian Perkara Niaga (Panitera, Padmud, PP)	9 s.d 11 Agustus 2023	30

Tabel 3. 22 Kegiatan Bimtek Ditjen Badilum

- b. Kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

No	Pelatihan	Tanggal	Orang
Data Diklat Tenaga Teknis			
1.	FGD Tindak Pidana Terorisme bagi Hakim di Denpasar	16 s.d 17 Januari 2023	19
2.	Permohonan Seleksi Calon Peserta		
	- Sertifikasi Mediator	20 s.d 24 Februari 2023	80
	- Sertifikasi Perikanan	27 Februari s.d .3 Maret 2023	80
		6 s.d 17 Maret 2023	
	- Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	13 s.d 17 Maret 2023	80
		20 s.d 24 Maret 2023	
	- Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Narkoba	20 s.d 24 Maret 2024	75
		27 s.d 31 maret 2023	
	- Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	22 s.d 26 Mei 2023	160

No		Pelatihan	Tanggal	Orang
			29 Mei s.d 10 Juni 2023	80
			17 s.d 11 Agustus 2023	
	-	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum	12 s.d 16 Juni 2023	40
			19 s.d 23 Juni 2023	
	-	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Umum	31 Juli s.d 4 Agustus 2023	120
			5 s.d 12 Agustus 2023	
	-	Pelatihan Sertifikasi Hubungan Industrial (PHI) Badan Litbang Diklat Kumdil MA Kerjasama dengan KY Wilayah Pulau Jawa dan Bali	10 s.d 18 Juli 2023	60
			20 s.d 28 Juli 2023	
3.		Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Tenaga Teknis pada Subdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	4 s.d 18 Desember 2023	27

No		Pelatihan	Tanggal	Orang
4.		Tindak Pidana Terorisme	15 Desember 2023	40
5.		Usulan Calon Peserta		
	-	Pelatihan Jimly School Kerjasama KY Wilayah PT Palu	8 s.d 10 Maret 2023	12
	-	Pelatihan Jimly School Kerjasama KY Wilayah PT Jawa Tengah	24 s.d 26 Mei 2023	12
	-	Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim masa kerja 0-8 tahun wilayah tugas PT Banten, PT Bante, PT Bandung, PT Palembang dan PT Tj. Karang	13 s.d 18 Maret 2023	20
	-	Pelatihan teknis Yudisial Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan	27 Februari s.d 3 Maret 2023 6 s.d 10 Maret 2023	40
	-	Diklat Terpadu SPPA Th. 2023	16 Februari s.d 3 Maret 2023 28 Maret s.d 13 April 2023	6

No		Pelatihan	Tanggal	Orang
			2 s.d 17 Mei 2023	
	-	Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi hakim masa kerja 8-15 tahun wilayah PT Banten dan PT Bandung	8 s.d 12 Mei 2023	20
	-	Pelatihan ekplorasi Pelanggaran KEPPH Wil PT. Pontianak	6 s.d 9 Juni 2023	25
	-	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Surakarta	19 s.d 23 Juni 2023	20
6.	Penugasan Peserta			
	-	Pelatihan singkat HKI di Jayapura	10 s.d 13 April 2023	30
	-	Lokakarya Regional Antara Penegak Hukum di Phuket Thailand	2 s.d 5 Mei 2023	2
	-	FGD Kepailitan/PKPU dan HKI di Surabaya	28 s.d 31 Mei 2023	56
	-	Pelatihan singkat Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah hukum PT Jambi	5 s.d Juni 2023	30
	-	Pelatihan singkat Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah hukum PT Banjarmasin	10 s.d 13 Juli 2023	30

No		Pelatihan	Tanggal	Orang
	-	Peserta FGD Kepailitan/PKPU dan HKI	11 s.d 14 Oktober 2023	72
7.	-	Pelatihan Tindak Pidana Pemilihan Umum	24 s.d 27 Oktober 2023	45
			21 s.d 24 November 2023	45
8.		Kegiatan Pengelolaan Arsip Pejabat Negara dan Arsip Perkara	25 s.d 27 Oktober 2023	26

Tabel 3. 23 Bimtek Oleh Litbang

4. Penghargaan Prestasi Kinerja SDM Tenaga Teknis

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1817/DJU/SK/TI2.1.2/XI/2023 Tentang Penetapan Penghargaan Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum, banyak penghargaan yang di berikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai bentuk apresiasi pada pengadilan supaya lebih meningkatkan kinerja, berikut rincian penghargaan :

No	Jenis	Pengadilan Tinggi
1.	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	1. PT Kalimantan Timur
		2. PT Banjarmasin
		3. PT Riau
		4. PT Banda Aceh
		5. PT Riau
		6. PT Denpasar

No	Jenis	Klas	Pengadilan Negeri
2.	Administrasi Perkara dan Keuangan	IA K	I. PN Surakarta
			II. PN Sidoarjo
			III. PN Jakarta Utara
		IA	I. PN Tasikmalaya
			II. PN Lubuk Pakam
			III. PN Banjarmasin
			IV. PN Pangkalpinang
			V. PN Pontianak
			VI. PN Sleman
		IB	I. PN Banjarbaru
			II. PN Indramayu
			III. PN Bantul
			IV. PN Kediri
			V. PN Subang
			VI. PN Limboto
		II	I. PN Lubuk Sikaping
			II. PN Tembilah
			III. PN Bintuhan
			IV. PN Batang
			V. PN Kefamenanu
			VI. PN Praya

No	Jenis	Kategori	Pengadilan Negeri
3.	Penyelesaian Perkara Elitigasi	26 s.d 50 Perkara	1. PN Pematang
			2. PN Wangapu
			3. PN Sambas
		51 s.d 75 Perkara	1. PN Wonosobo
			2. PN Pelaihari
		76 s.d 100 Perkara	1. PN Pelaihari
			2. PN Negara
			3. PN Simalungun
		> 100 Perkara	1. PN Kupang
			2. Pelaihari
			3. Surabaya

NO	Jenis	Pengadilan Tinggi
4.	Implementasi Sistem	1. Riau
	Akuntabilitas Kinerja	2. Banda Aceh
	Instansi pemerintah (Sakip)	3. DKI Jakarta

Tabel 3.24 Penghargaan Lomba Pengadilan

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA/005.03.1.097450/2023 Tanggal 30 November 2023 dengan 1 (satu) Program Kerja yaitu **“Peningkatan Manajemen Peradilan Umum”** dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 497/DJU/PL08/4/2012 tentang Pelaksanaan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas KKN.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 136.121.289.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewenangan	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	Presentasi (%)
1	Pusat	Belanja Pegawai	9,300,653,000	9,290,957,890	99.90
2		Belanja Barang	42,790,283,000	42,436,320,664	99.17
3		Belanja Modal	6,607,674,000	6,593,948,555	99.79
Jumlah			58,698,610,000	58,321,227,109	99.36
4	Daerah	Pagu Daerah	77,422,679,000	76,028,397,344	98.20
Jumlah			136,121,289,000	134,349,624,453	98.70

Tabel 4.1 Pagu

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 58.698.610.000,- (lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 58.322.602.109,- (lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan serapan sebesar 99,36 %, sedangkan pagu anggaran daerah sebesar Rp.77.422.679.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus

Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.76.028.397.344,- (tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 98,20%, sehingga jumlah alokasi seluruhnya sebesar Rp 136.121.289.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp. 134.349.624.453,- (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau 98.70%.

**Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2023**

NO	KODE DAN NAMA KEGIATAN	ANGGARAN						Kinerja (%)	
		PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI %	TARGET	REALISASI		
(005.03.07)									
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM									
1	(1046) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp	2,000,000,000	Rp	1,782,676,220	217,323,780	89.13	100%	100%
2	(1049) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	77,716,709,000	Rp	76,322,348,858	1,394,360,142	98.21	100%	100%
3	(6243) Dukungan Manajemen Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp	48,956,765,000	Rp	48,903,832,719	52,932,281	99.89	100%	100%
4	(6627) Dukungan Manajemen Teknis Peradilan Umum	Rp	5,386,628,000	Rp	5,282,282,058	104,345,942	98.06	100%	100%
5	(6630) Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp	2,061,187,000	Rp	2,058,484,598	2,702,402	99.87	100%	100%
Jumlah		Rp	136,121,289,000	Rp	134,349,624,453	1,771,664,547	98.70	71%	71%

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Manajemen Aset/Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, selama periode Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola Aset/Barang Milik Negara meliputi:

A. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan gedung dan bangunan rumah negara/dinas yang diperuntukan untuk para hakim, pejabat dan pegawai di lingkungan peradilan umum.

Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
1	Jl. Sitalasari No B2 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	1	352	No. 3571394 Hak Pakai No 62
2	Jl. Sitalasari No B1 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	2	398	No. 3571396 Hak Pakai No 64
3	Jl. Sitalasari No B3 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	3	296	No. 3571396 Hak Pakai No 67
4	Jl. Sitalasari No C4 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	4	416	No. 3567643 Hak Pakai No 68
5	Jl. Sitalasari No B4 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	5	335	No. 3569803 Hak Pakai No. 69

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
6	Jl Cipinang Jaya LL No B1 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	6	337	No. 3567643 Hak Pakai No.104
7	Jl Cipinang Jaya LL No B2 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	7	266	No.3567720 Hak Pakai No. 103
8	Jl Cipinang Jaya LL No C2 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	8	266	No. 3567648 Hak Pakai No. 105
9	Jl Cipinang Jaya LL No C3 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	9	266	No. 3567723 Hak Pakai No. 109
10	Jl Cipinang Jaya LL No C6 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	10	377	No. 3567637 Hak Pakai No. 114
11	Jl Cipinang Jaya LL No B3 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	11	266	No. 3567645 Hak Pakai No. 111
12	Jl Cipinang Jaya LL No C1 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	12	264	No. 35677222 Hak Pakai No. 108
13	Jl Cipinang Jaya LL No C4 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	13	263	No. 3567721 Hak Pakai No. 107
14	Jl Cipinang Jaya LL No B5 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang	14	266	No. 3567644 Hak Pakai No. 112

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
	Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur			
15	Jl Cipinang Jaya LL No B4 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	15	266	No. 3567646 Hak Pakai No. 113
16	Jl. Ampera Raya Gang Sulastri No C1- C12, B1-B2 Rt 05 Rw 02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	16	4.724	No 3599029 Hak Pakai No. 10
17	Jl. Ampera Raya Gang Rini No C1- C12 Rt. 06 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	17	3.108	No. 3598691 Hak Pakai No. 16
18	Jl. Flamboyan II & IV Kel. Sunter Mas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	18	9.240	No. 6809219 Hak Pakai No. 41
19	Jl. Antariksa III No. C8 Kel. Cipinang Besar Selatan	20	152	No. 3567717 Hak Pakai No 59
20	Jl. Swakarsa 4 Rt 03 Rw 02 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	22	813	No. 852582 Hak Pakai No 524
21	Jl. Ampera raya Gang Kancil No C1- C7	23	4.075	No 3560575 Hak Pakai No. 12
22	Jl. Cipinang Jaya LL No C7, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	24	270	No. 3567647 Hak Pakai No 110
23	Jl. Agung Tengah 1 dan 4 Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung priok	25	10.138	No. 6869348 Hak Pakai No. 41
24	Jl. Agung Tengah 1 No. C1-C3 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	26	550	No. 7005392 Hak Pakai No. 53
25	Jl. Ampera Raya Terusan I Gang Polri Rt 03 Rw 02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	27	1675	No 558794 Hak Pakai No. 59
Total			39.379	

Tabel 4.3 Tanah

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Golongan/Type	Jumlah
1.	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit
2.	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen	4 unit
3.	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	46 unit
4.	4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	5 unit
5.	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	16 unit
6.	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	14 unit
Jumlah Gedung dan Bangunan			86 unit

Tabel 4.4 Gedung dan Bangunan

C. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas Operasional yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua):

No	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Honda WF 125 SF	1	2006	B.6122.SQA	Baik
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2	2006	B.6121.SQA	Rusak Berat
3.	Honda Mega Pro GL 160 D	4	2006	B.6124.SQA	Baik
4.	Honda Mega Pro GL 160 D	5	2006	B.6125.SQA	Rusak Berat

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
5.	Honda Mega Pro GL 160 D	6	2006	B.6126.SQA	Baik
6.	Honda Mega Pro GLP III	7	2005	B.6237.SRQ	Baik
7.	Honda Mega Pro GLP III	8	2005	B.6238.SRQ	Rusak Berat
8.	Honda Mega Pro GLP III	9	2005	B.6239.SRQ	Baik
9.	Honda Mega Pro GLP III	10	2005	B.6240.SRQ	Rusak Berat
10.	Honda NF 125 TRF	16	2008	B.6562.SQO	Baik
11.	Honda NF 125 TRF	17	2008	B.6567.SQO	Baik
12.	Honda NF 125 TRF	18	2008	B.6565.SQO	Baik
13.	Honda NF 125 TRF	19	2008	B.6566.SQO	Baik
14.	Honda NF 125 TRF	20	2008	B.6563.SQO	Baik
15.	Honda NF 125 TRF	21	2008	B.6564.SQO	Baik
16.	Honda Mega	22	2003	B.6306.PCQ	Rusak Berat
17.	Honda Mega Pro GLP III	26	2005	B.6952.PCQ	Baik
18.	Honda Mega Pro GLP III	24	2005	B.6954.PCQ	Rusak Berat
19.	Honda Mega Pro GLP III	25	2005	B.6953.PCQ	Rusak Berat
20.	Honda Supra X 125	26	2015	B.6867.PYG	Baik
21.	Honda Supra X 125	27	2015	B.6868.PYQ	Baik

Tabel 4.5 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Toyota Kijang Innova G M/T	1	2006	B.1127.FQ	Baik
2.	Toyota Avanza E M/T	2	2006	B.1354.FQ	Baik
3.	Toyota Avanza E M/T	4	2006	B.1343.FQ	Baik
4.	Toyota Avanza E M/T	7	2006	B.8167.WU	Baik
5.	Toyota Avanza G M/T	8	2006	B.8170.WU	Baik
6.	Toyota Avanza E M/T	14	2007	B.2560.UQ	Baik
7.	Toyota Avanza E M/T	15	2007	B. 2647.UQ	Baik
8.	Toyota Avanza G M/T	17	2007	B. 2655.UQ	Baik
9.	Toyota Rush S 1.5 A/T	19	2014	B. 1359.PQR	Baik
10.	Toyota Kijang Innova G A/T	20	2015	B.1733.PQR	Baik
11.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 BC	21	2015	B.7434.PPA	Baik
12.	Toyota Kijang Innova V A/T	22	2011	B.1337.PX	Rusak Berat

Tabel 4.6 Kendaraan Dinas Operasional Roda empat

3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (enam):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Hyundai	6	2009	B.7524.IO	Rusak Berat
2.	Mitsubishi	7	2007	B.7223.IO	Rusak Berat
3.	Hyundai	8	2009	B.7518.IO	Baik
4.	Toyota Dyna 130 XT	9	2013	B.7197.PPA	Baik
5.	Toyota Dyna 130 XT	10	2013	B.7198.PPA	Baik

Tabel 4.7 Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam

D. Peralatan dan Mesin (Perkantoran)

Peralatan dan Mesin yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket./Kondisi
1.	Mesin Absensi	4 Unit	Baik
2.	Server	12 Unit	Baik
3.	Rak Server	6 Unit	Baik
4.	Filling Kabinet Besi	109 Unit	Baik
5.	Lemari Besi	224 Unit	Baik
6.	Rak Besi	130 Unit	Baik
7.	Kursi Besi/Metal	510 Unit	Baik
8.	Brandkas	9 Unit	Baik

Tabel 4.8 Peralatan dan Mesin

Melakukan Tranfer Keluar Aset/Barang Milik Negara berupa :

- CCTV kepada 322 Satuan Kerja Pengadilan Negeri;
- Laptop, Printer dan scanner kepada 100 satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

E. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja. Oleh karena itu Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung terus dilakukan Tahun Anggaran 2023 antara lain dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaaan Belanja Modal	Volume
1.	Wallmount Rack	1 Unit
2.	Lampu Studio Podcast	2 Unit
3.	AC Split	2 Unit

Tabel 4.9 Pengadaan Sarpras Belanja Modal

b. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Renovasi Rumah Negara Jl. Ampera Raya Gg. Kancil No C5	1 Unit
2.	Renovasi Rumah Negara Jl. Ampera Raya Gg. Kancil No C6	1 Unit

Tabel 4.10 Pembangunan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan

F. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

a. Pengadaan Kebutuhan/Keperluan Perkantoran (Belanja Barang)

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
1	Keperluan Pokok Pegawai (Air Minum, Majalah/Koran, dll)	12 Bulan
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	2 Paket
3	Bahan Penggandaan Kertas/Toner	3 Paket
4	Map dan Amplop	1 Paket
5	Pencetakan dan Pengadaan Blanko/Formulir/Kop Surat dan keperluan kantor lainnya	2 Paket
6	Pengadaan Kalender Dinding Ditjen Badilum	3500 Unit
7	Pengadaan Kalender Meja Ditjen Badilum	3500 Unit
8	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	1 Paket
9	Pengadaan Pakaian Dinas Putih MA	1 Paket
10	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	12 Bulan
11	Pengadaan Sewa Tanaman Dalam Pot	12 Bulan

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
12	Pengadaan Pewangi Ruangan dan Pemeliharaan	12 Bulan
13	Pengadaan Sewa Dispenser	12 Bulan
14	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan
15	Pengadaan Provider Internet	12 Bulan
16	Pengadaan Provider Internet Server/Backup	12 Bulan

Tabel 4.11 Pengadaan Kebutuhan Perkantoran (Belanja Barang)

b. Layanan Rumah Tangga

1. Rapat

No	Bulan	Rapat
1	Januari	2
2	Februari	3
3	Maret	4
4	April	2
5	Mei	2
6	Juni	3
7	Juli	5
8	Agustus	3
9	September	2
10	Oktober	6
11	November	4
12	Desember	3
Jumlah		39

Tabel 4.12 Layanan Rapat

2. Pelaksanaan Perbaikan/Prasarana Kantor dengan rician sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Perbaikan
1	Januari	-
2	Februari	2
3	Maret	1
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	3
7	Juli	-
8	Agustus	1
9	September	2
10	Oktober	3
11	November	2
12	Desember	-
Jumlah		14

Tabel 4.13 Perbaikan/Prasarana Kantor

3. Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 2	10	12 Bulan
2	Kendaraan Dinas Roda 4	22	12 Bulan
3	Kendaraan Dinas Roda 6	5	12 Bulan
Jumlah		32	

Tabel 4.14 Perawatan Peralatan Kantor

- c. Pengelolaan Sarana Kerja Pengadilan yang meliputi :
- Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Negeri dan Buku Jurnal Keuangan PHI sebanyak 2.774 buku
 - Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi, Buku Induk Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi dan Buku Penerimaan Hak-hak kepaniteraan 452 buku
 - Buku jurnal keuangan perkara PN3.827 buku
 - Buku SKUM/Kwitansi PN 873 buku
 - Buku Keuangan Biaya Eksekusi 1.000 buku

- Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan PN 948 buku
- Buku Induk Keuangan perkara 910 buku
- Buku kas bantu PT dan PN 920 buku
- Register Tipikor dan Register Niaga sebanyak 1.075 register
- Register Pidana sebanyak 9.996 register
- Register Perkara Pidana Anak sebanyak 3.093 register
- Register Perdata sebanyak 4.833 register
- Register PHI dan register Keuangan PHI 855 register
- Toga Hakim PT dan PN sebanyak 1.500 stel
- Jas Panitera sebanyak 370 Stel
- Tanda Jabatan Hakim dan Panitera sebanyak 425 buah
- Bendera Mahkamah Agung Sebanyak 360 buah
- Palu hakim 480 buah

G. Persuratan

Adapun klasifikasi surat tersebut adalah:

1. Penerimaan surat masuk dari Januari sampai Desember tahun 2023 sebanyak 11.008 (Sebelas ribu seratus delapan) surat dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Surat Diterima	
1	Januari	1,365	Surat
2	Februari	932	Surat
3	Maret	955	Surat
4	April	662	Surat
5	Mei	910	Surat
6	Juni	822	Surat
7	Juli	1,361	Surat
8	Agustus	938	Surat
9	September	845	Surat
10	Oktober	874	Surat
11	November	676	Surat
12	Desember	668	Surat
Jumlah		11,008	Surat

Tabel 4.15 Surat Masuk

2. Pengiriman Surat Keluar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia maupun oleh Staf Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum sebanyak 3.228 (tiga ribu dua ratus dua puluh delapan) surat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Surat Terkirim	
1	Januari	443	Surat
2	Februari	211	Surat
3	Maret	159	Surat
4	April	249	Surat
5	Mei	322	Surat
6	Juni	253	Surat
7	Juli	204	Surat
8	Agustus	453	Surat
9	September	215	Surat
10	Oktober	214	Surat
11	November	373	Surat
12	Desember	132	Surat
Jumlah		3,228	Surat

Tabel 4.16 Surat Keluar

3. Jumlah Penomoran surat yang dikeluarkan sebanyak 8.396 (delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh enam) nomor surat dengan rincian sebagai berikut:

No	Penomoran	Dirjen Badilum	Sekretariat	Direktorat Bingganis	Direktorat Papu
1	Surat Biasa	1,814	1,504	877	349
2	Surat Keputusan	1,842	575	32	10
3	Surat Edaran	5	-	-	-
4	Memorandum	186	-	-	-
5	SK Pengadaan Barang/Jasa	-	629	354	53
6	Surat Pengadaan Barang/Jasa	-	91	70	5
Jumlah		8,396			

Tabel 4.17 Penomoran Surat

3. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran alat pengolah data dan pendukung lainnya seperti:

A. Pemeliharaan

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket./Kondisi
1.	Personal Komputer (PC)	166 Unit	Baik
2.	Notebook/Laptop	112 Unit	Baik
3.	Printer	188 Unit	Baik
4.	Proyektor LCD/Infokus	13 Unit	Baik
5.	Tablet PC	3 Unit	Baik
6.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	51 Unit	Baik
7.	External Portable Hardisk	31 Unit	Baik
8.	Server	12 Unit	Baik
9.	Rak Server	6 Unit	Baik
10.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	10 Unit	Baik
11.	Kamera Electronics	9 Unit	Baik
12.	Filling Kabinet Besi	109 Unit	Baik
13.	Workstation	35 Unit	Baik

Tabel 4.18 Pemeliharaan

B. Pemutakhiran

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaaan Belanja Modal	Volume
1.	PC Unit	10 Unit
2.	Laptop	8 Unit
3.	Printer	10 Unit
4.	Scanner	3 Unit

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaaan Belanja Modal	Volume
5.	Hardisk	4 Unit
6.	Laptop IT Grafis dan Design	1 Unit
7.	Video Wall	14 Unit
8.	Video Wall Controler	1 Unit
9.	Smart TV	2 Unit
10.	UPS	2 Unit
11.	Mini PC	5 Unit
12.	Switch Poe	1 Unit
13.	Wireless Access Point	5 Unit
14.	Web Camera Conference	3 Unit

Tabel 4.19 Pemutakhiran

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Zona Integritas

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor t90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah prediktit yang memberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan penataan tatalaksana, penetapan sistem manajemen (SDM), penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 135/DJU/OT.01.3/1/2023 Tentang Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dimana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan Pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas bagi Pengadilan Tinggi secara daring melalui *zoom meeting* sekaligus evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan pengadilan dengan syarat pengusulan WBK/WBBM seperti :

- a. Presentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK 100%
- b. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi Pegawai yang wajib LHKPN 100%.
- c. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi sistem informasi pelaporan

harta kekayaan (SIHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100%.

- d. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM minimal 1 (satu) tahun;
- e. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan predikat SAKIP dari evaluasi internal minima “BB” untuk satker yang diusulkan WBBM;
- f. Pada penilaian terakhir telah memperoleh predikat “A” dalam penilaian evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan pengadilan/akreditasi penjaminan mutu;
- g. Satker yang akan diusulkan pada tahap penilaian pendahulu tidak memiliki catatan hukum disiplin berat pada Badan Pengawasan (Pernyataan tertulis Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri).

Pengadilan yang mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari Tahun 2021 s.d 2023 adalah

No	Tahun		Nama Satuan Kerja
1	2023	a.	PT Mataram
		b.	PT Riau
		c.	PT Pontianak
		d.	PN Bangkinang
		e.	PN Negara
		f.	PN Selong

No	Tahun		Nama Satuan Kerja
2	2022	a.	PT Banda Aceh
		b.	PT Gorontalo

No	Tahun		Nama Satuan Kerja
3	2021	a.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		b.	PN Amuntai
		c.	PN Bantaeng
		d.	PN Bantul
		e.	PN Kalianda
		f.	PN Karanganyar
		g.	PN Klaten
		h.	PN Kotabaru
		i.	PN Pangkal Bun
		j.	PN Raha
		k.	PN Rote Ndao
		l.	PN Sintang
		m.	PN Sukadana
		n.	PN Tanjung
		o.	Tasikmalaya

Tabel 5. Pengadilan yang mendapatkan WBK

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan PTSP yang dimulai dari awal sampai akhir dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akutabel tetapi juga mengacu pada prinsip 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Dan mengatur 3S yaitu senyum, salam dan sapa. Penilaian PTSP sangat ketat dan secara langsung turun ke satuan kerja untuk menilai dengan kriteria-kriteria yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya lomba PTSP ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berorientasi pada hasil dalam bentuk pelayanan prima pada masyarakat dan mengurangi hambatan birokrasi. Sehingga diadakan lomba untuk

meningkatkan kinerja di Pengadilan, Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yaitu:

No	Type	Peringkat	Pengadilan Tinggi
1.	A	I.	Banjarmasin
2.	B	II.	Palangkaraya
3.	B	III.	Riau
4.	B	IV.	Jambi
5.	A	V.	Denpasar
6.	A	VI.	Bandung

Terfavorit			
1.	A		Bandung

No	KLAS	Peringkat	Pengadilan Negeri
1.	IA K	I.	Surakarta
		II.	Bandung
		III.	Sidoarjo
		IV.	Palembang
		V.	Tangerang
		VI.	Jakarta Selatan
2.	IA	I.	PN Jember
		II.	PN Sleman
		III.	PN Lubuk Linggau
		IV.	PN Pekanbaru
		V.	PN Pontianak
		VI.	PN Padang
3.	IB	I.	PN Singaraja
		II.	PN Subang

No	KLAS	Peringkat	Pengadilan Negeri
4.	II	III.	PN Sampit
		IV.	PN Martapura
		V.	PN Indramayu
		VI.	PN Metro
		I.	PN Wonosari
		II.	PN Tanjung
4.	II	III.	PN Pare-pare
		IV.	PN Penajam
		V.	PN Cikarang
		VI.	PN Batang

Terfavorit		
No	Klas	Pengadilan Tinggi
1.	IA K	PN Jakarta Pusat
2.	IA	PN Jember
3.	IB	PN Kediri
4.	II	PN Marisa

Tabel 5.1 Penghargaan PTSP

3. Inovasi Pelayanan Publik

A. Beberapa inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang merupakan inovasi layanan peradilan dalam bentuk aplikasi maupun kebijakan antara lain :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 Meluncurkan Inovasi Aplikasi berupa **Sistem Pemantauan Kinerja**

Pengadilan Terintegrasi

atau disebut dengan **Satu Jari**, aplikasi Satu Jari terdapat menu-menu seperti eksekusi yang menampilkan lama proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri, dan juga bisa menampilkan



Gambar 5.1 Satu Jari

perkara mana yang pelaksanaan eksekusi yang terlambat. Aplikasi Satu Jari juga bisa melihat kinerja Pengadilan dalam mengelola dan penyerapan anggaran pada pengadilan, selain itu ada menu yang bisa menggambarkan kondisi aset Barang Milik Negara pada seluruh Pengadilan termasuk kendaraan dan rumah dinas. Aplikasi di luncurkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, **Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial **Dr. Sunarto, S.H., M.H**, Ketua Kamar Pembinaan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M** dan Ketua Kamar Agama **Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M** didampingi para pejabat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum **H. Bambang Myanto, S.H., M.H**. kunjungan berkenaan syukuran Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha yang dilaksanakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023 bertempat di Aula lantai 1, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

2. **UMK Cerdas KUM** adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang menyatukan

program Posbakum dengan pembebasan biaya berperkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo) dalam hal ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai nomor izin berusaha, inovasi berdampak terhadap terlindungi hak pelaku usaha mikro bagian dari masyarakat tidak mampu dalam memperoleh perlindungan hukum;

3. **Ampuh (sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh)**



Gambar 5. 2 Ampuh

adalah program kerja yang merupakan lanjutan dari program akreditasi penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Program kerja ini bertujuan untuk mendorong

peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Selain itu dalam rangka pemberian layanan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang bertujuan untuk membantu memudahkan dalam pemberian layanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan penghargaan kepada pengadilan yang melakukan inovasi layanan peradilan dalam bentuk aplikasi maupun program antara lain :

1. Pengadilan Negeri Pelaihari dengan inovasi **Kijang Mas Tala** (kolaborasi layanan penyelesaian masalah bidang tanah ekstrasmigrasi di wilayah Kabupaten, tanah dan laut)

- merupakan program layanan terintegrasi kerjasama antara pengadilan dengan kantor pertanahan tanah, laut dan pemerintah, kabupaten tanah laut.
2. Pengadilan Negeri Jember dengan inovasi **Tilik Desa** merupakan program mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait.
 3. Pengadilan Negeri Wonosari dengan inovasi **Mediator Desa** program yang pengadilan berkontribusi dan berperan aktif dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam menjadikan kepala desa sebagai mediator-mediator handal untuk menyelesaikan masalah.
 4. Pengadilan Negeri Pontianak dengan inovasi **e-Perma** merupakan layanan elektronik yang dapat diakses oleh public secara online untuk pendaftaran perjanjian bersama di pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan negeri.
 5. Pengadilan Negeri Tangerang dengan inovasi **e-Laksa** merupakan layanan elektronik kependudukan satu atap terkait pelaporan pencatatan sipil.
 6. Pengadilan Negeri Biak dengan inovasi **NAPI BYAK** merupakan aplikasi layanan pemberi inovasi yang berbasis website.

B. Informasi Sarana dan Prasarana Disabilitas

Sarana dan prasarana disabilitas sudah mulai diterapkan di seluruh Pengadilan di Indonesia sesuai peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Daftar sarana dan prasarana Disabilitas dan Data statistic penyandang disabilitas berdasarkan wilayah Hukum sebagai berikut :

1. Daftar Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2023

No	Nama Sarana dan Prasarana Disabilitas	Jumlah		
		Sesuai Standar	Belum sesuai standar	Tidak Ada
1	Ruang Sidang Ramah Disabilitas	34	293	67
2	Lahan Parkir bagi Penyandang Disabilitas	380	0	14
3	Kursi Tunggu Khusus Bagi Penyandang Disabilitas	374	0	20
4	Kursi Roda	391	0	3
5	Tongkat Penyangga	352	0	42
6	Cruck	299	0	95
7	Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	257	130	7
8	Guiding Block dan Warning Block dari gerbang depan menuju ruangan PTSP, ruang sidang dan ruangan lainnya	204	172	18
9	Ramp / Bidang landai menuju ruangan PTSP, ruang sidang dan ruangan lainnya	356	12	26
10	Spot Khusus bagi Penyandang Disabilitas di ruang sidang, ruang PTSP dan ruangan lainnya	295	24	75
11	Ruang tunggu / Ruang kesehatan untuk penanganan penyandang disabilitas	232	30	132
12	Obat - Obatan untuk penanganan penyandang disabilitas	159	0	235
13	Rambu / Papan Petunjuk Jalan yang Informatif	326	0	68
14	Pojok Bermain Anak	262	0	132
15	Website yang ramah bagi penyandang disabilitas	370	0	24
16	Layar/media Informasi dengan audio screen reader	281	0	113
17	Layar/media Informasi yang disisipkan bahasa isyarat	216	0	178
18	Media cetak dengan huruf braille	297	0	97
19	Media komunikasi audio / alat bantu dengar	270	0	124
20	Form Penilaian Personal Perdata	327	0	67
21	Form Penilaian Personal Pidana	325	0	69
Jumlah		6,007	661	1,606
Nb	Total Satker 416			
	Satker yang melaporkan : 394			
	Satker yang tidak melaporkan : 22			

Tabel 5.2 Sarpras Disabilitas

2. Statistik Penyandang Disabilitas sebagai Pihak Berperkara Tahun 2023

NO	Pengadilan Tinggi	Statistik Penyandang Disabilitas				
		Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Terdakwa	saksi	Korban
1	Banda Aceh	3	0	0	12	0
2	Medan	1	1	0	22	0
3	Padang	0	0	1	7	1
4	Riau	1	0	0	5	0
5	Jambi	0	0	0	0	0
6	Palembang	0	0	0	5	0
7	Bengkulu	0	0	0	7	0
8	Tanjung Karang	0	0	0	9	0
9	Bangka Belitung	0	0	1	15	0
10	Jakarta	0	0	0	6	0
11	Bandung	0	0	0	17	0
12	Semarang	0	0	0	22	0
13	Yogyakarta	0	0	2	33	2
14	Surabaya	0	0	0	8	1
15	Banten	0	0	0	62	1
16	Denpasar	0	0	0	23	1
17	Mataram	0	0	1	3	0
18	Kupang	0	0	0	2	0
19	Pontianak	0	0	1	14	0
20	Palangkaraya	0	0	0	6	0
21	Banjarmasin	0	1	0	2	0
22	Samarinda	0	0	0	3	1
23	Manado	1	0	0	1	0
24	Palu	0	0	0	3	1
25	Makassar	0	0	0	17	1
26	Kendari	0	0	0	4	0
27	Gorontalo	0	0	0	15	0
28	Ambon	1	0	0	3	0
29	Maluku Utara	0	0	0	4	0
30	Jayapura	0	0	0	2	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	5	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	2	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0	1	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	
Total		7	2	6	340	9

Tabel 5.3 Statistik Disabilitas Berperkara

Dalam rangka menunjang standar kebutuhan layanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan *Study Visit* ke Perth, Australia Barat yang dilakukan pada akhir Tahun 2023 yang bertujuan untuk mempelajari dan berbagi pengalaman tentang pelayanan terhadap kelompok disabilitas, persidangan secara elektronik dan pengawasan secara elektronik. pada kegiatan ini, rombongan mengunjungi *Child Court of Western Australia* (pengadilan anak Australia Barat untuk mempelajari pengelolaan teknologi informasi, berdiskusi dengan University of Western Australia (UWA) dan melihat lembaga masyarakat di Freemantle Prison. Para peserta mengikuti seminar dengan lembaga swadaya *Mama Respond* yang bergerak di bidang penguatan keluarga, terutama pada penguatan perempuan dan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mana di hadiri oleh **Dr. Henry Supriyono, S.H., M.Hum** (Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat), **Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.LM** (Ketua Pengadilan Negeri Manokwari), **Marliyus MS, S.H., M.H** (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur), **Willem Depondoye, S.H** (Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan **Candra, S.H** (Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Ditjen Badilum serta Staf bidang teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan di bawahnya yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 26 Desember 2023.



Gambar 5. 3 Study Visit Pelayanan

BAB VI PENGAWASAN

1. INTERNAL

Dalam rangka mendapatkan pelayanan publik yang mudah, transparan dan dengan biaya yang ringan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai pembinaan terhadap satuan kerja (unit pelaksana teknis) di bawahnya dan terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengawasan terhadap jam kerja dari mulai jam masuk hingga jam pulang kantor oleh seluruh pimpinan secara berjenjang;
- b. Mengadakan Pembinaan berupa Peningkatan Disiplin berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/SK/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang peningkatan Kinerja baik terhadap pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun panitera serta pegawai;
- c. Memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) berupa promosi atau mutasi terhadap tenaga teknis hakim maupun panitera serta pegawai;
- d. Melaksanakan *surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan Pembinaan Teknis Asesor;
- e. Memonitoring ke Pengadilan yang menerima anggaran pos Bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan serta pembebasan biaya perkara, mengenai pelaksanaan dan penyerapan anggaran tersebut;
- f. Melaksanakan pembinaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serap anggaran di seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum;
- g. Memonitoring pengadilan tentang PTSP, layanan hukum Prodeo, pelaksanaan layanan posbakum, sidang di luar gedung pengadilan, pelaksanaan e-litigasi Pengadilan Negeri, pelaksanaan E-litigasi Hakim,

Keterbukaan Informasi Publik, Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara, *role model*, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan penerapan Aplikasi Pelayanan Publik dengan cara memberikan penghargaan lewat lomba.

2. EVALUASI

- a. Mengevaluasi data-data yang masuk dari pengadilan-pengadilan yang telah di monitoring yaitu administrasi peradilan umum dan kebutuhan sarana kerja pengadilan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran posbakum, sidang di luar Gedung Pengadilan serta pembebasan biaya perkara;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serap anggaran di seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum melalui pemanggilan terhadap satker yang daya serapnya masih rendah;
- d. Pemeliharaan lomba kegiatan Ditjen Badilum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan peradilan yang mudah di gunakan oleh masyarakat dan dalam mencapai visinya yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung” melalui program dan inovasi di bidang informasi teknologi untuk dapat menghadirkan peradilan yang modern, mudah diakses, biaya ringan dan berkeadilan serta dapat melayani masyarakat pencari keadilan. Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mencapai keberhasilan antara lain:

- a. Melaksanakan *Fit and Proper Test dan Profile Assesment* terhadap Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri;
- b. Penerapan saran dan prasarana untuk disabilitas 100%, tetapi ada beberapa yang belum sesuai standar;
- c. Meluncurkan aplikasi Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi, aplikasi Satu Jari, UMK Cerdas KUM, dan Ampuh (sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh).
- d. Penyerahan penghargaan lomba PTSP kepada 36 Pengadilan, layanan hukum 18 Pengadilan, administrasi perkara dan keuangan kepada 21 Pengadilan, pelaksanaan Litigasi dengan kategori tertentu kepada 24 Pengadilan, Sakip sebanyak 3 Pengadilan dan untuk inovasi pada pengadilan sebanyak 6 Pengadilan;
- e. Melakukan Pembinaan secara berkala pada pengadilan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 dan 8 Tahun 2016;
- f. Daya serap anggaran Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu sebesar 99,36%, daya serap anggaran pada satker daerah sebesar 98,20%.

2. REKOMENDASI

Sebagai lanjutan capaian akreditasi yang sudah mencakup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 akan melaksanakan:

- a. Penilaian penghargaan lomba PTSP dan program ditjen badilum lainnya;
- b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, target Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 75% dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
- c. Memulai penerapan aplikasi aplikasi Satu Jari, UMK Cerdas KUM, dan Ampuh (sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh).



Surat Keputusan

**TIM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
& LAPORAN KINERJA**

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TAHUN 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 48/DJU/SK/OT.1.6/I/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023**

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja perlu menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2023 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan
Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan mengumpulkan data
dan analisis yang dibutuhkan serta menyusun target rencana kinerja tahun
2025 berdasarkan TOR dan RAB yang telah disusun oleh masing-masing
unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 15 Januari 2024

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**

The block contains the official stamp and signature of the Director General of the General Court. The stamp is circular with the text 'MAKARAH AGUNG RI' and 'DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM'. A blue ink signature is written over the stamp.

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Arsip.

Lampiran I
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 49/DJU/SK.OT.1.6/i/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

1. Data dan Narasi :
tentang
A. Pendahuluan
B. Kebijakan Umum
C. Visi dan Misi
D. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
E. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

Koordinator : Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum
Anggota : 1. Puji Mulyani, S.E
2. Sukatno, S.H
3. Edwin Ruliawan, S.H., M.H
4. Nopinus Andreas Purba, SE
5. Indra Kurniawan, S.E., M.M
6. Suwarni, S.H
7. Arif Hidayat, S.Kom
8. Ivonne Sari Indah, S.Si
9. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom
10. Norcha Satria Adi N, S.H
11. Frisca Viradiba, S.Psi
12. M. Ridwan, A.Md

2. Data dan Narasi :
tentang
A. Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Peradilan Umum
B. Pengawasan Internal dan Evaluasi

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H. M.H
Anggota : 1. Herti Setiawati, RR., S.E., M.Hum
2. Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si
3. Romi Permana, S.H., M.H
4. Saenal Akbar, S.H., M.H
5. Septin Sri Noni, S.E
6. Ade Supriatna, S.H., M.H
7. Ade Soniawati, S.H., M.H

3. Data dan Narasi :
tentang
1. Keadaan Perkara
2. Regulasi Tahun 2023

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H. M.H
Anggota : 1. Lies Khadijah, S.H., M.H
2. Candra, S.H
3. Budi Setioko, S.H., M.H
4. Achmad Basyari, S.E
5. Aris Priyanto, S.T
6. Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom
7. Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T
8. Dodon Angin Wiyono, S.Kom

Lampiran II
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 49/DJU/SK.OT.1.6/1/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

I. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum

Indikator kinerja:

- a. Jumlah naskah tenaga teknis yang disusun
- b. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis
- c. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H. M.H

Anggota : 1. Herti Setiawati, SH., MM
2. Saenal Akbar, S.H., M.H
3. Suwarni, S.H
4. Aris Priyanto, ST
5. Arif Hidayat, S.Kom
6. Ivonne Sari Indah, S.Si
7. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom
8. Norcha Satria Adi Nugroho, S.H

II. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum

Indikator Kinerja:

- a. Jumlah Naskah Kebijakan yang disusun;
- b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum;
- c. Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan;
- d. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Sidang diluar gedung Pengadilan;
- e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara;
- f. Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu;
- g. Presentase Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H.M.H

Anggota : 1. Puji Mulyani, S.E
2. Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum
3. Sukatno, S.H
4. Lies Khadijah, S.H., M.H
5. Candra, S.H
6. Budi Setioko, S.H., M.H
7. Edwin Ruliawan, S.H., M.H
8. Nopinus Andreas Purba, S.E
9. Frisca Viradiba, S.Psi

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.